SISTEM BAGI HASIL NELAYAN ALAT TANGKAP PAYANG DI DESA BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :
Dedi Firmansyah
NIM. 105080400111028

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SISTEM BAGI HASIL NELAYAN ALAT TANGKAP PAYANG DI DESA BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
Dedi Firmansyah
NIM. 105080400111028

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

SKRIPSI

SISTEM BAGI HASIL NELAYAN ALAT TANGKAP PAYANG DI DESA BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Oleh :
Dedi Firmansyah
NIM. 105080400111028

telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 24 Desember 2014
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No. : _____
Tanggal : _____

Menyetujui,

Dosen Penguji I	**Dosen Pembimbing I**
Dr. Ir. Anthon Efani, MP	**Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP**
NIP. 19650717 199103 1 006	**NIP. 19610417 199003 1 001**
Tanggal:	**Tanggal:**
Dosen Penguji II	**Dosen Pembimbing II**
Zainal Abidin, S.Pi, MBA, MP	**Wahyu Handayani, Spi, MBA, MP**
NIP. 19770221 200212 1 008	**NIP.19750310 200501 2 001**
Tanggal:	**Tanggal:**

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, November 2014
Mahasiswa

Dedi Firmansyah

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Dedi Firmansyah. SISTEM BAGI HASIL NELAYAN ALAT TANGKAP PAYANG DI DESA BLIMBING, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP dan Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP.

Dalam masyarakat nelayan, konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan kualitas alat tangkap yang di operasikan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya (Kusnadi, 2007). Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik merupakan salah hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, (2) Identifikasi stratifikasi sosial pada nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, (3) Sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus (*case* study). Sedangkan cara teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling.* Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Pada tahun 1940 nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing masih menggunakan secara manual dan menggunakan layar dan dayung untuk melaut, besar jaringnya kurang lebih sekitar 10 meter, dan tali "*batek"* panjang 50 meter sisi kanan dan sisi kiri, jumlah nelayan melaut satu perahu sekitar 4 orang, daerah penangkan masih didekat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, kurang lebih 30 mil dari darat dan jumlah perahu di Blimbing baru ada 30 perahu tradisional. Di saat tahun 1980, munculah mesin penggerak, pertama donfeng dan yammar (mesin diesel), panjang tali *"batek"* hampir 100 meter dan jumlah nelayan semakin berkembang, Pada tahun 2008-2013, menggunakan mesin ps 100 dan ps 120 mitsubishi, menggunakan 4 unit, sebagai pendorong 3 unit, dan penggerak gardan. Sedangkan jumlah nelayan Blimbing pada tahun 2013 berjumlah 3.470 nelayan.

Dalam pembagian kerja nelayan payang masing-masing mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pembagian kerja yang sudah diterapkan oleh pemilik perahu (juragan perahu), sehingga dalam melaut menghasilkan hasil tangkapan yang maksimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, ada dua fungsi dari pembagian kerja nelayan payang yaitu pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK (anak buah kapal) atau "*belah"*.

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Blimbing, yaitu dari segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK atau "*belah"* adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu, karena

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan, sehingga dari segi kekayaan pemilik perahu atau juragan perahu dalam pembagian hasil lebih besar dari ABK atau "*belah",* dari segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat nelayan payang di Desa Blimbing tidak ada terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan kelas, sehingga hubungan sosial terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan.

Bagi hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing di bagi menjadi dua bagian atau *"umanan"* antara pemilik perahu atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Pendapatan bersih tersebut setelah dikurangi biaya operasional, retribusi TPI (Tempat pelelangan ikan), biaya manol, penjual ikan, dan biaya yang lainnya.

Secara umum pemilik perahu atau juragan perahu di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan khususnya pada nelayan payang membebankan biaya operasional seperti terjadinnya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang, kepada ABK atau "*belah"* dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, Disini terlihat bahwa nelayan ABK atau "*belah"* mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga nelayan ABK atau "*belah"* menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* sebesar dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar TPI (tempat pelelangan ikan) Brondong, sehingga nelayan ABK atau "*belah"* memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK atau "*belah"* menyadari bahwa modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau "*belah"* dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduannya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal.

Saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu: perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong khususnya masyarakat nelayan Desa Blimbing, perlu adannya pembentukan paguyuban nelayan khususnya nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang untuk menghindari konflik antar nelayan, dan perlu adanya pengawasan dalam mengawal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pencurian ikan secara berlebihan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis sanggup menyelesaikan Laporan skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Nelayan Alat Tangkap Payang Di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur" Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok pembahasan yang meliputi perkembangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing, mengidentifikasi stratifikasi sosial yang ada dalam nelayan khususnya nelayan *payang* di Desa Blimbing, mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan *payang* di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Laporan skripsi ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana S1 bagi seluruh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang. Penulis mengucapkan banyak terimah kasih atas terselesaianya laporan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, kakak dan adik yang memberikan do'a dan dukungan yang luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Wahyu Handayani, Spi, MBA, MP, selaku Dosen Pembimbing II atas waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.

4. Teman-teman keluarga besar team futsal CINTA FC, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama mengerjakan laporan skripsi sampai dengan terselesainya laporan skripsi ini.
5. Teman-teman AGL dan Genk Mpok, yang selalu membawa keceriaan di sela-sela kejenuhan dalam proses pengerjaan laporan skripsi ini
6. Teman-teman Sosek 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam terselesainnya laporan skripsi ini.

Penulis menyadari didalam laporan ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
RINGKASAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
1. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian 7

2. TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Pengertian Nelayan 9
2.2.1 Nelayan Alat Tangkap *Payang* 9
2.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan 10
2.4 Stratifikasi Sosial 13
2.4.1 Lapisan Sosial Dalam Masyarakat 14
2.4.2 Lapisan Sosial Masyarakat Nelayan 15
2.5 Pembagian Kerja Nelayan *Payang* 16
2.6 Sistem Bagi Hasil 18
2.7 Kajian Hukum 20
2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian 23

3. METODE PENELITIAN **27**
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 27
3.2 Metode Penelitian 27
3.3 Teknik Pengambilan Informan 28
3.4 Jenis dan Sumber Data 29
3.4.1 Data Primer 30
3.4.2 Data Sekunder 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 31
3.5.1 Observasi 31
3.5.2 Wawancara 32
3.5.3 Dokumentasi 32
3.6 Batasan Dalam Pengukuran Penelitian 33
3.7 Analisa Data 33

4. Hasil dan Pembahasan **36**
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 36
4.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Topografi 36
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Blimbing 37
4.1.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia 37
4.1.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 38
4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 38
4.1.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 39

4.1.2.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 40
4.2 Karakteristik Fisik Binaan Kawasan PPN Brondong 41
4.2.1 PPN Brondong 41
4.2.2 KUD Minatani 43
4.2.3 RN (Rukun Nelayan) Blimbing 43
4.3 Perkembangan Produksi Perikanan 52
4.3.1 Musim Ikan 53
4.3.2 Perkembangan Alat Tangkap 54
4.3.3 Produksi dan Nilai Produksi Ikan 53
4.4 Keadaan Umum Kabupaten Lamongan dan Desa Blimbing 57
4.5 Perkembangan Alat Tangkap Payang di Desa Blimbing 59
4.6 Pembagian Kerja Nelayan Payang 60
4.7 Sosial Masyarakat Nelayan Payang Desa Blimbing 65
4.7.1 Perilaku Masyarakat Pesisir 65
4.7.2 Stratifikasi Sosial 67
4.8 Sistem Bagi Hasil Nelayan Payang 69
4.8.1 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan 70
4.8.2 Bagi Hasil Usaha Penangkapan Alat Tangkap Payang 73
4.9 Potensi dan Pereda Konflik Dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Payang . 81

5. Kesimpulan dan Saran 83

5.1 Kesimpulan 83
5.2 Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia 37
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 38
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 38
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 39
5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 40
6. Fasilitas PPN Brondong 42
7. Fasilitas RN Blimbing 45
8. Jumlah Perahu Yang Bongkar di PPN Brondong 54
9. Jenis dan Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPN Brondong 56
10. Bagi Hasil Nelayan Payang 77
11. Pendapatan Bagi Hasil Nelayan Payang 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

12. Kerangka Berfikir 26
13. Tugu Mercusuar PPN Brondong 41
14. Kantor KUD Minatani 44
15. Tiang Pancang Atau "*Anjer*" 47
16. Acara Malam Tasyakuran 49
17. Acara Pembukaan "*Petik Laut*" 49
18. Acara Hiburan Wayang Kulit 50
19. Acara Bakti Sosial 51
20. Goyang Pantura 51
21. Pembagian Kerja Nelayan Payang 62
22. Skema Stratifikasi Sosial 68
23. Proses Pendaratan Ikan Sampai Dengan Bagi Hasil 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Gambar Peta 88
2. Gambar Penelitian 89

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia sebagai Negara bahari (*archipelagic state*), mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95' sampai dengan 141' BT dan di antara 60' LU dan 110' LS. Sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km ^{2} (termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia/ZEE). Kalau dihitung, panjang pantai yang mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km, serta jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir terdapat lebih dari 40 juta orang. Berdasarkan data yang ada pada *UNCLOS* '82, luas wilayah perairan indonesia meliputi kawasan laut seluas 3,1 juta km^2, yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,8 juta km^2 dan wilyah laut seluas 0,3 juta km^2. Di samping luas geografis di atas, Indonesia juga memliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam sera berbagai kepentingan yang berad dalam ZEE yang telah diakui secara international, seluas 2,7 juta km^2. Berdasarkan luas wilayah lautnya Indonesia tercatat sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah dan konfigurasi pulau–pulau yang sangat unik dan strategis (Pramono, 2005).

Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu, ada juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk meme-lihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan2 lainnya. Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan sumberdaya hayati, yang dinyatakan dengan tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi.

Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari : ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton) , cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di 9 (sembilan) wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (Lasabuda, 2013).

Kabupaten Lamongan pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal panjang pantai 47 km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 7527 unit, alat tangkap sebanyak 8456 unit diantaranya *pure sein* sebanyak 274 unit, *gillnet* sebanyak 1.071 unit, *tramnel net* sebanyak 300 unit, payang sebanyak 846 unit, *dogol* sebanyak 2.453, *prawai/rawai* sebanyak 521 unit, dan alat tangkap *bubu* sebanyak 2.991 unit. Usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 pendaratan ikan (PPI) sekaligus tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu mulai arah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Lohgung, Desa Labuhan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, sedangkan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Kranji, dan Desa Weru (Pemkab Lamongan, 2013).

Dalam masyarakat nelayan, konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan kualitas alat tangkap yang di operasikan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya (Kusnadi,

2007). Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik merupakan salah satu hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Sebelum lahirnya UU bagi hasil perikanan hubungan bagi hasil pemilik perahu dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap diatur dalam hukum adat. Pengaturan tersebut umumnya tidak tertulis dan masing-masing daerah tidak sama, namun tidak jarang dengan pengaturan tersebut lebih mengutungkan pada mereka yang mempunyai kedudukan kuat yaitu pemilik perahu. Peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan menurut pasal 1 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya, peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap dan penggarap tambak (Khoirotul, 2004: 6).

Bagi hasil merupakan suatu lembaga yang sudah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam istilah di masing-masing daerah seperti maro, mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di Minahasa dan di Sulawesi Selatan di sebut teseng, banyak sekali variasi bagi hasil namun pada umumnya secara prinsip sama yaitu adanya perjanjian antara dua pihak masing-masing menyumbangkan sesuatu baik berupa asset, tenaga, modal, ataupun ketrampilan dan mereka masing-masing berhak atas hasil yang di peroleh menurut bagian yang telah ditentukan sebelumnya (Khoirotul, 2004: 8). Adapun istilah bagi hasil di daerah Lamongan

khususnya daerah pesisir antara lain di daerah Brondong, Blimbing, Paciran, Kranji, Lohgung, Labuhan, dan Weru, lebih di kenal dengan sebutan "*umanan"*

Menurut Endang (2011: 153) nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan hak atau berkuasa atas kapal / perahu dan alat tangkap ikan yang di pergunakan untuk menangkap ikan, nelayan penggarao (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenanganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan atau membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjulan ikan hasil tangkapan.

Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangkapan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) mendapatkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan penggarap. Sebagai contoh di PPN Brondong Lamongan, sistem bagi hasil disini (Brondong Lamongan) disebut dengan "*umanan".* Dalam setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan terdapat satu pemilik (juragan/*daoke*) kapal yang ikut dalam penangkapan ikan. Sedang yang lainnya adalah nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) yang disebut dengan "*belah".* Dalam setiap kapal penangkapan ikan biasanya terdapat 25 ABK atau tergantung jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan (untuk *payang* biasanya 10-15 ABK dan *cantrang* antara 10 ABK). Dalam sistem bagi hasil "*umanan*" penghasilan dibagi 40 s/d 50 "*umanan"* untuk juragan dan sisanya dibagi untuk ABK. Jika ABK merangkap atau menduduki posisi atau jabatan tertentu, misalnya sebagai nahkoda atau juru pandu, maka dia mendapatkan tambahan "*umanan"* lagi, contoh: ABK yang merangkap sebagai juru pandu maka dia mendapatkan 1 *uman* untuk ABK dan 1 *uman* untuk posisi sebagai juru pandu. Pada prinsipnya setiap jabatan atau

posisi ada bagian masing-masing sehingga kalau ABK merangkap jabatan, maka bagiannya akan bertambah pula. "*Umanan"* dibagi dalam bentuk uang setelah dipotong pinjaman, selain pembagian dalam bentuk *uman* ABK mendapat bagian atau jatah "*iwak-iwak*an". "*Iwak-iwak*-an" ialah pembagian ikan untuk dibawa pulang sebagai lauk pauk. Namun dalam prakteknya *iwak-iwak*-an ini oleh nelayan lebih banyak dijual daripada dibawa pulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari (Endang, 2011: 156). Sistem bagi hasil Nelayan Payang Desa Blimbing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tidak jauh beda dengan sistem bagi hasil yang di terapkan oleh PPN Brondong Lamongan.

Ketimpangan dalam sistem bagi hasil seperti ini nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya dan nampaknya kondisi seperti ini cenderung dilestarikan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan (penggarap) tidak mempunyai pilihan. Dalam arti karena keterbatasan modal dan *skill* yang dimiliki oleh nelayan. Disamping itu juga karena budaya atau sikap *entrepeneur* yang tidak dimiliki oleh nelayan sehingga mereka lebih suka menyediakan tenaga dan resiko nyawanya daripada kehilangan modal. Sedang bagi pemilik (juragan) karena mereka sebagai pemilik modal dengan resiko kehilangan modal maka untuk menghindari atau meminimalkan resiko ini mereka menerapkan sistem bagi hasil sebagaimana dijelaskan di atas, yang kecenderungan dengan segala upaya atau bentuk sistem bagi hasil untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita kadang dirasa kurang adil bagi nelayan (Endang, 2011: 157).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kondisi sistem pengupahan,bagi hasil dan pengajian yang tidak berasaskan pada prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan, awak kapal tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemupukan modal melalui simpanan

yang disisihkan dari hasil yang di peroleh sehari-hari. Dengan demikian, seluruh pendapatan yang di perolehnya tidak memiliki kapasitas pemupukan modal dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan salah satu sifat usaha perikanan tangkap yang terkait dengan faktor ketidak pastian hasil tangkapan, menyebabkan sistem upah dan pengajian sulit diterapkan terutama pada usaha perikanan skala kecil sulit bagi nelayan pemilik kapal untuk menjamin pengeluaran yang pasti seperti untuk membayar upah gaji secara tetap bagi nelayan pengelola atau abk (anak buah kapal).

1. Bagaimana perkembangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2. Bagaimana stratifikasi sosial nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
3. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

1.3 Tujuan penelitian

1. Perkembangan penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2. Identifikasi stratifikasi sosial pada nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
3. Sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Lembaga Akademis

   Sebagai kajian informasi baru untuk menambah keilmuwan tentang permasalahan yang terkait dengan masalah–masalah di bidang perikanan terutama mengenai masalah sistem bagi hasil nelayan *payang* dan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang penelitian sistem bagi hasil di dunia perikanan.

2. Nelayan

   Sebagai informasi baru tentang sistem bagi hasil nelayan payang. Supaya kedepanya dijadikan pedoman masyarakat nelayan payang dalam penerapan sistem bagi hasil yang baik.

3. Pemerintah

   Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kajian kebijakan tentang sistem bagi hasil yang baik, supaya bidang perikanan kedepanya semakin maju.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Meita Risqa Laila (2006), tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Andon di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil penangkapan antara nelayan andon dan nelayan lokal baik menggunakan alat tangkap pancing dan Jaring di daerah pesisir pantai Sendang Biru perbedaanya adalah pada nelayan lokal pada umumnya menggunakan persentase, sedangkan pada nelayan andon menggunakan bagian, hal ini dikarenakan budaya pada masing-masing daerah.

Berdasarkan penelitian Yoga Edwi Prianantа (2003), tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap Pure Seine yang menggunakan alat bantu rumpon di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trengalek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di wilayah pesisir Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek secara umum Nelayan pemilik membebankan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para Nelayan pandega dengan cara ditanggung bersama, karena pihak Nelayan pandega telah banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah). Disamping itu dalam pengambilan pinjaman kepada bakul sebesar 10% dan pembelian hasil tangkapanya dibawah standard yang dilakukan oleh bakul menurut nelayan pemilik merugikan usahanya, tetapi nelayan pemilik tetap melakukan kesepakatan ini untuk keberlangsungan dari usaha penangkapannya.

Sistem ini dianggap sebagai budaya lokal yang memberikan imbal balik kepada bakul yang telah memberikan modal pembuatan rumpon.

2.2 Pengertian Nelayan

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 10 dan 11 Menjelaskan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) g*rosston* (GT).

Menurut Brandt (*fish catching methods of the world,* 1984:4-6) *dalam* Siombo (2010), nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.

2.2.1 Nelayan Alat Tangkap Payang

Payang adalah pukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan/perut (*body/belly*) dan kaki/sayap (*leg/wing*). Namun ada juga pendapat yang membagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari bagian–bagian kecil yang tiap bagian mempunyai nama sendiri–sendiri. Namun bagian ini untuk tiap daerah umumnya berbeda–beda sesuai daerah masing–masing. Besar mata mulai dari ujung kantong sampai dengan ujung kaki berbeda–beda, bervariasi mulai dari 1 cm (atau kadang kurang) sampai kurang lebih 40 cm. berbeda dengan jaring trawl dimana bagian bawah mulut jaring (bibir bawah) lebih menonjol ke belakang, maka untuk payang justru bagian atas mulut jaring (*upperlip*) yang menonjol ke belakang. Hal ini disebabkan payang tersebut umumnya digunakan

untuk menangkap jenis–jenis ikan pelagik yang biasanya hidup dibagian lapisan atas air atau kurang lebih demikian dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah bila terkurung jaring. Oleh karena bagian bawah mulut jaring lebih menonjol ke depan maka kesempatan lolos menjadi terhalang dan akhirnya masuk kedalam kantong jaring. Pada bagian bawah kaki atau sayap dan mulut jaring di beri pemberat. Sedangkan bagian atas pada jarak tertentu diberi pelampung. Pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan di bagian tengah dan mulut jaring. Pada kedua ujung depan atau sayap disambung dengan tali panjang yang umumnya disebut tali selambar (DKP, 2011).

Alat tangkap payang berupa jaring yang terdiri dari sebuah kantong yang panjang dan dua buah sayap. Alat tangkap ini dalam pengoperasiaanya dibantu dengan rumpon sebagai pengumpul ikan dilakukan pada siang hari. Sedangkan pada malam hari terutama pada hari-hari gelap (tidak dalam keadaan terang bulan) dengan menggunakan alat bantu petromaks. Penangkapan dengan *Payang* dapat dilakukan dengan perahu layar maupun dengan kapal motor. Penggunaan tenaga berkisar antara 6 orang untuk payang berukuran kecil, 16 orang untuk payang besar. Nelayan Labuhan (Kabupaten Pandeglang) dan Karang Antu (Kabupaten Serang) menangkap dengan *payang* tanpa bantuan rumpon, mereka mencari gerombolan ikan dengan menggunakan panda–tanda alami antara lain adanya loncatan–loncatan ikan di permukaan air, dan ria–riak kecil di permukaan air karena adanya kelompok ikan yang berenang dekat permukaan air dan burung–burung yang terbang rendah sambil menyambar–nyambar di permukaan air (Samad, 1998).

2.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan

Komunitas masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan berbeda dengan karakteristik masyrakat agraris yang berprofesi petani.

Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan cenderung memliki karakteristik khas, yakni, keras, tegas, dan terbuka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pesisir khusunya nelayan sulit menerima perubahan karena merka menganggap perubahan itu akan membawa pengaruh negative bagi kehidupan mereka. Berdasarkan karakteristik human system dalam tipologi fishery system seperti yang dikemukakan oleh kusnadi (2000) *dalam* Laila (2010) terdapat beberapa karakteristik umum dari nelayan yaitu :

a. Nelayan berada menurut latar belakang social seperti umur, pendidikan, dan status social.
b. Komunitas nelayan komersial, nelayan dapat bervariasi menurut *occupational commitmennya* seperti nelayan penuh, nelyan sambilan utama dan nelayan sambilan, atau menurut *occupational pluralism*-nya seperti nelayan dengan sumber pendapatan beragam, dan lain sebagaianya.
c. Nelayan yang dapat bervariasi menurut motivasi dan perilaku dalam hal ini terdiri dari dua kelmpok yaitu nelayan dengan karakteristik profi maximizers yaitu nelayan yang aktfi menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung berperilaku seperti layaknya perusahaan, dan kelompok nelayan satisficers atau nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

selain ditinjau berdasarkan karakteristik umum masyarakat nelayan juga dapat ditinjau berdasarkan pada tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam tiga kategori, yaitu :

a. Nelayan tradisional

Nelayan tradisional adalah nelayan yang dalam aktivitas-aktivitas penagkapan ikan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, seperti : perahu, jukong, jarring, sederhana, dan pancing. Nelayan jenis ini beroperasi didaerah 0-3 mil laut garis pantai. Dengan perlatan sederhana, nelayan jenis ini hanya mengandalkan kemampuan seadanya untuk menangkap ikan dilaut. Sebagaimana kebanyakan nelayan tradisional, mata pencaharian mereka hanya mengandalkan jenis-jenis ikan yang tersebar tidak jauh dari pantai. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya ketergantungan terhadap lingkungan di sekitar pantai, dan kelangsungan terhadap habitat ikan yang ada di pantai.

Dari beberaa sumber didapat kebanyakan nelayan tradisional didominasi oleh penduduk lokal yang tersebar di kawasan pantai sendang biru. Hal ini mengakibatkan kecenderungan untuk mengeksploitasi areal perikajan di wilayah yang tidak jauh dari domisili mereka.

b. Nelayan semi modern

Nelayan semi modern merupakan nelayan yang sudah mempunyai perlengkapan/peralatan alat tangkap, kapal dan sarana penunjang lainnya lebih maju dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan ini sudah memperlengkapi kemampuan untuk menangkap ikan dengan peralatan seperti : kapal dengan mesin yang bertonase <10 GT, jaring dan peralatan navigasi (kompas). Areal penangkapan (*fishing ground*) mulai dari 3-6 mil dari garis pantai. Keberadaan nelayan semi modern memerlukan penanganan yang lebih intensif, mengigat adanya pola pikir sebagaian dari mereka untuk merubah pola tradisional ke pola lebih modern akan berdampak bagi kemajuan nelayan di masa depan.

c. Nelayan modern

Nelayan modern merupakan salah satu jenis nelayan yang sudah menggunakan teknologi modern dalam menangkap ikan di laut. Nelayan jenis ini banyak menggunakan alat-alat modern seperti : penentuan posisi GPS (*Global Potisioning System),* pendekatan ikan, jaring, gill net, bubu ikan, bubu lobster dan perbekalan yang lainnya. Dengan bertambahnya kemampuan teknologi, nelayan jenis ini mampu bertahan selama 3 tahun di tengah lautan. Areal penangkapan 6 mil ke atas dari garis pantai.

Berkembangya nelayan modern kebanyakan berasal dari Sulawesi (bugis) yang beroperasi pada daerah diluar areal wilayah nelayan tradisional dan semi modern. Kedatangan nelayan ini, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi nelayan lokal di perairan sendang biru.oleh karena itu, nelayan lokal di perairan sendang biru mulai tahu cara modern dalam menangkap ikan di laut, seperti penggunaan rumpon penentuan posisi kapal dengan GPS, pendeteksi keberadaan ikan dengan fish sinder dan sebagainnya.

2.4 Stratifikasi Sosial

Kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa latin, yakni *stratum* yang berarti tingkatan dan *socius* yang berarti teman atau masyarakat. Jadi secara umum dapat kita katakana bahwa stratifikasi sosial adalah tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat (Agung dan Raharjo, 2009).

Stratifikasi sosial adalah adanya penilaian yang berbeda dari suatu kelompok individu berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan itu dapat berupa kekayaan, kekuasaan, keturunan (kehormatan), dan pendidikan. Adanya penilaian yang berbeda dari suatu kelompok lain berdasarkan sesuatu yang dianggap lebih, menggakibatkan timbulnya suatu pola penggelompokkan masyarakat. Dengan demikian, dapat kita bahwa stratifikasi sosial adalah

pembedaan/pengelompokan masyrakat kedalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat (Maryati dan Suryawati, 2001).

2.4.1 Lapisan Sosial Dalam Masyarakat

Menurut Marayati dan Suryawati (2001), lapisan sosial dalam masyarakat disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada suatu lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan tunggal. contohnya, orang kaya biasanya akan dengan mudah memiliki kekuasaan, pendidikan, bahkan kehormatan.

Studi tentang stratifikasi sosial menurut Haviland (1987) *dalam* Laila (2010), meiputi kajian menggenai perbedaan yang mungkin kelihatannya tidak adil. Stratifikasi sosial adalah gejala yang umum dan kuat dalam beberapa masyarakat di dunia lain, khususnya peradapan dengan jumlah penduduknya yang besar dan heterogen. Masyarakat yang berstratifikasi pada dasarnya adalah masyarakat yang penduduknya terbagi menjadi dua kelompok atau lebih, dan kedudukan kelompok yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan jelas terlihat dalam hal hak, penghasilan, pembatasan, dan kewajiban. Anggota kelompok yang dinilai lebih rendah akan cenderung lebih sedikit dari hak para anggota kelompok yang dinilai lebih tinggi. Kelompok ada yang kecenderungan tidak mendapatkan penghargaan yang sama serta mempunyai kewajiban yang kemungkinan besar sedikit lebih berat, meskipun anggota kelompok yang dinilai tinggi juga memiliki perbatasan dan kewajibannya sendiri yang khas untuk ditaati. Stratifikasi sosial pada hakekatnya adalah ketidaksamaan yang dilembagakan, tanpa peringkat tinggi lawan rendah, tidak ada stratifikasi. Perbedaan-perbedaan sosial tanpa peringkat bukanlah stratifikasi.

2.4.2 Lapisan Sosial Masyarakat Nelayan

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. *Kedua*, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. *Ketiga*, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002).

Menurut Kusnadi (2003), lapisan sosial masyarakat nelayan yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses, lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar warga masyrakat nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perikanan, akses modal, dan akses pasar hanya menjadi milik sebagian kecil masyrakat yaitu mereka yang berada pada lapisan atas.

2.5 Pembagian Kerja Nelayan *Payang*

Pembagian kerja adalah pekerjaan yang dibagi–bagi, atau distribusikan diantara anggota suatu kelompok, dan pekerjaan diarahkan serta dikoordinasikan kelompok ini menjadi suatu tim. Dalam suatu tim, dan umumnya bila terdapat spesialisasi dan pembagian kerja, dimana setiap kategori staf menggunakan keahliannya capai tujuan, manajemen bertugas mengatur keseimbangan proporsi tiap jenis pekerja untuk pekerjaan yang harus dilakukannya (Brahm, 1995).

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 10 dan 11. Menjelaskan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) g*rosston* (GT).

Menurut Fanni (2013), dalam pemilihan ABK para juragan memilihnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, khususnya pada bagian *tekong*. Tekong di anggap sebagai orang yang paling tahu keberadaan ikan di laut, sehingga akan mempengaruhi setiap hasil tangkapan ikan yang akan diperoleh. Dalam perkembangannya fungsi dan peran ABK disesuaikan dengan jenis perahu sebelum dan sesudah adanya alat tangkap yang lebih modern. Perahu jenis *sleret* merupakan perahu yang digunakan oleh nelayan di Pulau Gili untuk menangkap ikan di laut dengan menggunakan motor penggerak berupa mesin diesel berkekuatan besar serta alat untuk menarik jaring yang sudah digerakkan oleh tenaga mesin. Sedangkan pada perahu payang hitam jenis ABK tukang mesin tidak ditemukan karena, pada perahu payang hitam masih menggunakan tenaga manual manusia dan tenaga angin sebagai penggerak kapal dalam

setiap melaut. Menjelaskan spesialisasi pekerjaan pada kapal *sleret* sebagai berikut :

a. Fungsi *tekong* adalah sebagai penunjuk di mana ikan banyak berkumpul dan memerintahkan kepada para pandhega untuk menebar jaring di laut. Tekong mempunyai tanggung jawab besar dalam setiap proses penangkapan ikan, karena tekong dianggap sebagai orang yang paling tahu keberadaan ikan di titik-titik tertentu.
b. Juru mudi bertugas mengemudikan kapal sesuai dengan petunjuk *tekong* untuk menentukan daerah tangkapan ikan.
c. Tukang mesin pada perahu sleret berfungsi sebagai penjaga mesin dan perawat mesin pada saat melaut untuk mencegah kerusakan
d. Pengrabet kapal merupakan orang-orang yang melakukan perawatan terhadap kapal setelah dan di saat melaut. Pengrabet kapal biasanya berjumlah 2 orang dalam setiap kapal *sleret.* Tugas pengrabet kapal adalah merawat kapal dan memperbaiki kapal pada saaat kapal mengalami kerusakan seperti mengecat kapal dan membersihkan bagianbagian kapal yang kotor karena melaut, serta menyandarkan kapal pada saat kapal selesai melaut.
e. Pengrabet jaring melakukan tugasnya pada saat perahu tidak melaut dengan cara mengecek kerusakan setiap jaring yang digunakan sebelum dan sesudah melaut. Jumlah perawat jaring di dalam setiap kapal *sleret* berjumlah 2 orang.
f. Pandhega pada perahu sleret adalah sebagai tenaga penyebar jaring dan penarik jaring pada saat penangkapan ikan.

2.6 Sistem Bagi Hasil

Sebelum lahirnya UU bagi hasil perikanan hubungan bagi hasil pemilik perahu dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap diatur dalam hukum adat. Pengaturan tersebut umumnya tidak tertulis dan masing-masing daerah tidak sama, namun tidak jarang dengan pengaturan tersebut lebih mengutungkan pada mereka yang mempunyai kedudukan kuat yaitu pemilik perahu. Peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan menurut pasal 1 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya, peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap dan penggarap tambak (Khoirotul, 2004: 6).

Bagi hasil merupakan suatu lembaga yang sudah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam istilah di masing-masing daerah seperti maro, mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di Minahasa dan di Sulawesi Selatan di sebut teseng, banyak sekali variasi bagi hasil namun pada umumnya secara prinsip sama yaitu adanya perjanjian antara dua pihak masing-masing menyumbangkan sesuatu baik berupa asset, tenaga, modal, ataupun ketrampilan dan mereka masing-masing berhak atas hasil yang di peroleh menurut bagian yang telah ditentukan sebelumnya (Khoirotul, 2004: 8). Adapun istilah bagi hasil di daerah Lamongan khususnya daerah pesisir antara lain di daerah Brondong, Blimbing, Paciran, Kranji, weru, lebih di kenal dengan sebutan *"umanan".*

Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil

penangkapan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) mendapatkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan penggarap. Sebagai contoh di PPN Brondong Lamongan, sistem bagi hasil disini (Brondong Lamongan) disebut dengan "*umanan".* Dalam setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan terdapat satu pemilik (juragan/*daoke*) kapal yang ikut dalam penangkapan ikan. Sedang yang lainnya adalah nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) yang disebut dengan "*belah"*. Dalam setiap kapal penangkapan ikan biasanya terdapat 25 ABK atau tergantung jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan (untuk *payang* biasanya 10-15 ABK dan *cantrang* antara 10 ABK). Dalam sistem bagi hasil "*umanan*" penghasilan dibagi 40 s/d 50 "*umanan"* untuk juragan dan sisanya dibagi untuk ABK. Jika ABK merangkap atau menduduki posisi atau jabatan tertentu, misalnya sebagai nahkoda atau juru pandu, maka dia mendapatkan tambahan "*umanan"* lagi, contoh: ABK yang merangkap sebagai juru pandu maka dia mendapatkan 1 *uman* untuk ABK dan 1 *uman* untuk posisi sebagai juru pandu. Pada prinsipnya setiap jabatan atau posisi ada bagian masing-masing sehingga kalau ABK merangkap jabatan, maka bagiannya akan bertambah pula. "*Umanan"* dibagi dalam bentuk uang setelah dipotong pinjaman, selain pembagian dalam bentuk "*umanan"* ABK mendapat bagian atau jatah "*iwak-iwak*an". "*Iwak-iwak*-an" ialah pembagian ikan untuk dibawa pulang sebagai lauk pauk. Namun dalam prakteknya "*iwak-iwak*-an" ini oleh nelayan lebih banyak dijual daripada dibawa pulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari (Endang, 2011: 156). Sistem bagi hasil nelayan Payang Desa Blimbing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tidak jauh beda dengan sistem bagi hasil yang di terapkan oleh PPN Brondong Lamongan.

2.7 Kajian Hukum

Secara hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 2 tentang pembagian hasil yang berbunyi Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Selanjutnya, peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 3 tentang pembagian hasil yang berbunyi: (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Perikanan laut:
    a. Jika di pergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
    b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
2. Perikanan darat:
    a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
    b. Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(2) pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan

anatara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Peraturan yang lain, aturan tentang sistem bagi hasil juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1964 pasal 4 yang berbunyi bahwa beban–beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus sebagai berikut :

1. Perikanan laut:
   a. Beban–beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok atau jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut, biaya sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran – iuran yang disahkan oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu atau kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain–lainnya.
   b. Beban–beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu atau kapal serta alat–alat yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak es dan lain sebagainya.
2. Perikanan darat:
   a. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya–biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu.
   b. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak: disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan,

biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat di pakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan.

c. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari–hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak dan penangkapannya pada waktu panen.

Sedangkan peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 5 yang berbunyi (1) jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan–bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih mengutungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai. (2) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika disesuatu daerah didalam membagi bahan–bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka pemerintah daerah tingkat II dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut diatas. Penetapan pemerintah daerah tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan dan Kelautan.

2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kabupaten Lamongan pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal panjang pantai 47 km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 7527 unit, alat tangkap sebanyak 8456 unit diantaranya *pure sein* sebanyak 274 unit, *gillnet* sebanyak 1.071 unit, *tramnel net* sebanyak 300 unit, payang sebanyak 846 unit, *dogol* sebanyak 2.453, *prawai/rawai* sebanyak 521 unit, dan alat tangkap *bubu* sebanyak 2.991 unit. Usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 pendaratan ikan (PPI) sekaligus tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu mulai arah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Lohgung, Desa Labuhan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, sedangkan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Kranji, dan Desa Weru.

Sistem bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya, peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap.

Bagi hasil merupakan suatu lembaga yang sudah lama dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam istilah di masing-masing daerah seperti maro, mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, memperduai di Sumatera Barat, toyo di Minahasa dan di Sulawesi Selatan di sebut teseng, banyak sekali variasi bagi hasil namun pada umumnya secara prinsip sama yaitu

adanya perjanjian antara dua pihak masing-masing menyumbangkan sesuatu baik berupa asset, tenaga, modal, ataupun ketrampilan dan mereka masing-masing berhak atas hasil yang di peroleh menurut bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun istilah bagi hasil di daerah Lamongan khususnya daerah pesisir antara lain di daerah Brondong, Blimbing, Paciran, Kranji, Labuhan, Lohgung, dan weru, lebih di kenal dengan sebutan *"umanan"*.

Payang adalah pukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan/perut (*body/belly*) dan kaki/sayap (*leg/wing*). Namun ada juga pendapat yang membagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari bagian–bagian kecil yang tiap bagian mempunyai nama sendiri–sendiri. Namun bagian ini untuk tiap daerah umumnya berbeda–beda sesuai daerah masing–masing. Besar mata mulai dari ujung kantong sampai dengan ujung kaki berbeda–beda, bervariasi mulai dari 1 cm (atau kadang kurang) sampai kurang lebih 40 cm. berbeda dengan jaring trawl dimana bagian bawah mulut jaring (bibir bawah) lebih menonjol ke belakang, maka untuk payang justru bagian atas mulut jaring (*upperlip*) yang menonjol ke belakang. Hal ini disebabkan payang tersebut umumnya digunakan untuk menangkap jenis–jenis ikan pelagik yang biasanya hidup dibagian lapisan atas air atau kurang lebih demikian dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah bila terkurung jaring. Oleh karena bagian bawah mulut jaring lebih menonjol ke depan maka kesempatan lolos menjadi terhalang dan akhirnya masuk kedalam kantong jaring. Pada bagian bawah kaki atau sayap dan mulut jaring di beri pemberat. Sedangkan bagian atas pada jarak tertentu diberi pelampung. Pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan di bagian tengah dan mulut jaring. Pada kedua ujung depan atau sayap disambung dengan tali panjang yang umumnya disebut tali selambar.

Bagi hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing di bagi menjadi dua bagian atau *"umanan"* antara pemilik perahu atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK (anak buah kapal) atau "*belah*", dalam sistem bagi hasil tersebut berpotensi terjadinya konflik antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK (anak buah kapal) atau "*belah*". Kerangka berfikir dari uraian diatas dapat dilihat pada gambar 1.

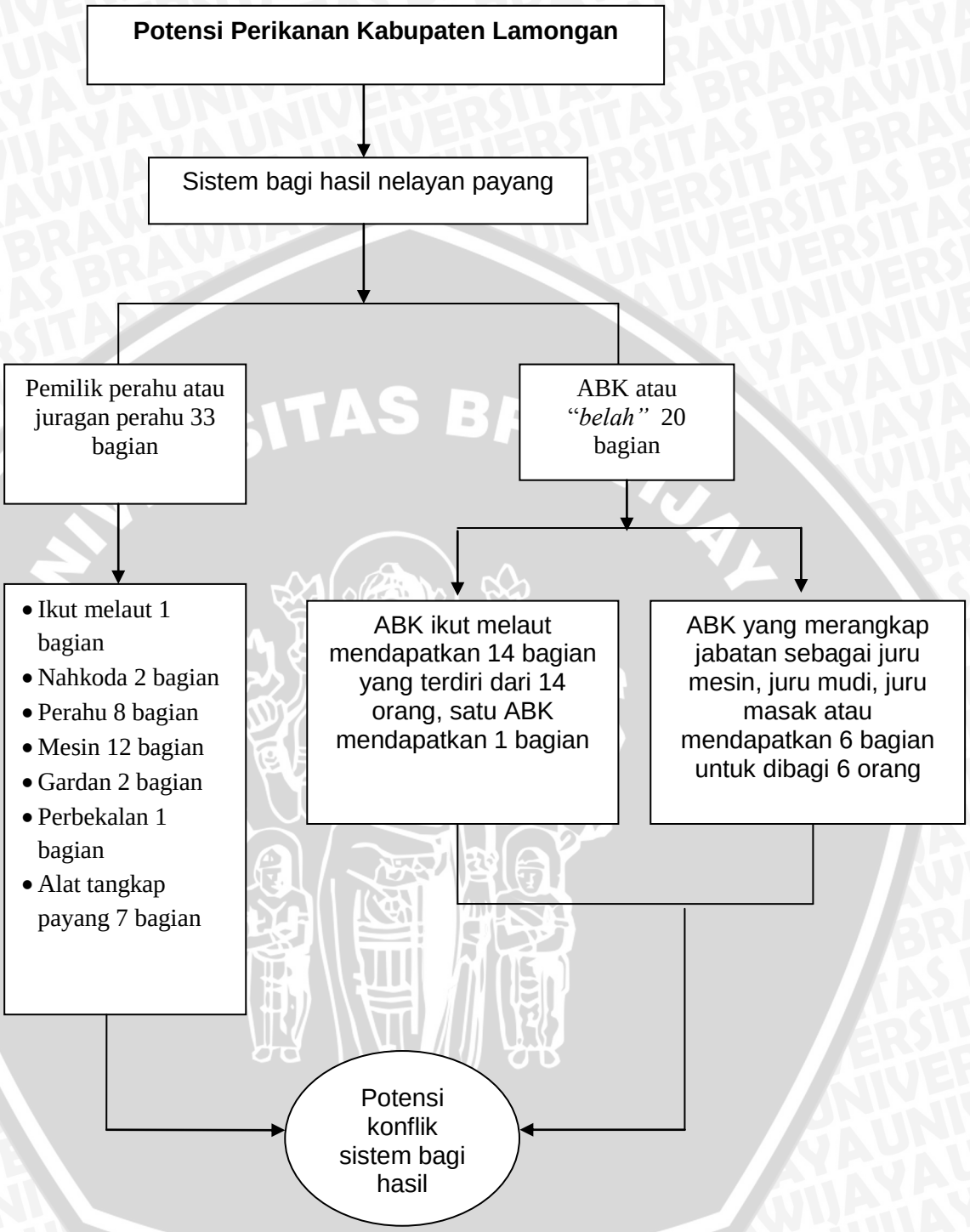

Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul sistem bagi hasil nelayan payang, lokasi penelitian terletak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada bulan Agustus-September 2014.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sudarman dan Darwis (2003), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok. Penelitian deskriftif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat, dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Sehingga dengan menggunakan metode deskriptif dapat mengambarkan kondisi dilapang, seperti kondisi daerah tentang sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang ini bersifat studi kasus (*case study*). Menurut Umar (Umar, 1997), studi kasus

merupakan penelitian yang terperinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya peneliti berusaha menemukan hubungan antara faktor-faktor yang ada didalamnya. Studi kasus kadang-kadang melibatkan peneliti dengan unit terkecil seperti perusahaaan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keuntungan riset studi kasus antara lain adalah penelitian dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat menjawab mengapa keadaan itu terjadi. Selain itu, melalui riset ini peneliti diharapkan dapat menemukan hubungan-hubungan yang sebelumnya tidak diharapkan, tetapi riset ini memiliki kelemahan-kelemahan, misalnya kajian secara relatif menjadi kurang luas dan dalam sulit digenerelisasikan dengan keadaan yang berlaku umum, dan cenderung mengarah ke subyektivitas, karena obyek penelitiannya dapat mempengaruhi prosuder penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis data tertulis berupa kata-kata dan kalimat yang berisi tentang sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

3.3 Teknik Pengambilan Informan

Pada penelitian sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, untuk narasumber pengelola teknik pengambilan sampelnya dengan metode *purposive sampling*. Menurut Umar (1998), *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Untuk mencari informan yang diteliti secara umum, untuk dijadikan nara sumber adalah masyarakat nelayan payang di Desa Blimbing Kecamatan

Paciran Kabupaten Lamongan. Untuk pencarian informan yang dipilih berdasarkan pekerjaan nelayan setempat dan informasi yang bisa dipercaya secara valid. Dalam penelitian ini untuk mengambil informan yang dirasa mengetahui informasi pokok yang diperlukan yaitu diantarannya juragan perahu (pemilik perahu), dan ABK atau "*belah",* dari pihak PPN Brondong dan RN Blimbing, serta tokoh masyarakat setempat. Adapun jumlah nelayan payang sebanyak 14 orang yang terdiri dari 4 juragan perahu (pemilik perahu), dan 10 orang abk atau *"belah"* yang terdiri dari 2 orang juru mesin, 2 orang juru mudi, 2 orang juru masak, serta 4 orang abk atau "*belah"* biasa. Selain itu, 1 orang dari pihak PPN Brondong, 2 orang dari pihak RN Blimbing yang terdiri dari 1 ketua RN Blimbing dan 1 orang anggota RN Blimbing, serta tokoh masyarakat setempat sebanyak 1 orang. Disamping itu untuk menambah informasi agar didapatkan informasi secara valid dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat bantu seperti hp, kamera, dan lain-lain.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2011), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting,* berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai respoden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011).

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh riset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data ini tidak tersedia karena memang belum ada riset sejenis yang pernah dilakukan atau hasil riset yang sejenis sudah terlalu kadaluwarsa. Jadi riset perlu melakukan pengumpulan atau penggadaan data sendiri karena tidak bias menggandalkan data dari sumber lain (Istijanto, 2005).

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesinior yang biasa dilakukan oleh peneliti. Misalnya, produsen suatu produk kosmetik ingin mengetahui perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Untuk itu diadakan wawancara atau kuesioner terhadap beberapa konsumen (Umar, 1997). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan metode survei dan metode observasi, atau wawancara langsung kepada narasumber (pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK atau "*belah"*) tentang sistem bagi hasil nelayan *payang*.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepihak lain yang telah mengumpulkannya di lapang. Periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitian. Keberadaan data sekunder tidak dipengaruhi oleh riset yang akan dijalankan oleh peneliti, dengan kata lain data sudah disediakan pihak lain (Istijanto, 2005).

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel–tabel atau diagram. Data sekunde ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Misalnya data tentang *rating* televise yang didapat

dari terbitan yang dikeluarkan oleh badan riset yang dikelola oleh swasta (Umar, 1997). Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dari kantor Kecamatan Paciran, keadaan umum penelitian, sejarah perkembangan nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing, dan data Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri – ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek–obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala–gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2011).

Observasi merupakan metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrument berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainya (Umar, 1997). Data yang dapat diperoleh melalui teknik observasi adalah pengamatan terhadap kegiatan sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(Interviewer)* yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara *(Interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil (Sugiyono,2011). Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab terhadap narasumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara di tunjukan kepada pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK atau *"belah"* tentang sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya momumental dari sesorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain–lain. Doukmen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain–lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

Menurut Moleong (2007), menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*. Definisi dari *record* adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan diambil meliputi data Desa, data acara petik laut di Desa Blimbing, perahu nelayan payang, jaring

payang, dan responden nelayan payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3.6 Batasan Dalam Pengukuran Penelitian

Sehubungan dengan topik penelitian tentan sistem bagi hasil Nelayan Payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, maka peneliti member batasan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Perkembangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2. Identifikasi sosial masyarakat nelayan khususnya nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
   a) Perilaku masyarakat nelayan di Desa Blimbing.
   b) Stratifikasi sosial antara juragan perahu (pemilik perahu) dengan ABK atau *"belah".*
3. Sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
4. Potensi konflik dari sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang dan pereda konflik yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang.

3.7 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), analisa data adalah data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisa data kualitatif bersifat indukti, yaitu suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun tahapan dalam menganalisa data sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction)*

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti Komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display)*

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

   Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis dan Keadaan Topografi

Kecamatan Paciran merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lamongan yang berada di belahan utara Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan jarak ±43 Km. yang terdiri dari 16 Desa 1 Kelurahan, 34 Dusun, 95 RW, 379 RT. Luas Wilayah Kecamatan Paciran 61,304 Km^2 terletak pada ketinggian 2-5 meter di atas permukaan air laut (untuk lebih jelasnya peta Kecamatan Paciran dapat dilihat pada lampiran 1) (Sumber data: Kecamatan Paciran, 2013).

Batas – batas wilayah Kecamatan Paciran ;

- Sebelah Utara : Laut Jawa ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
- Sebelah Barat : Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Lokasi penelitian mengenai sistem bagi hasil nelayan alat tangkap payang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Desa Blimbing ini berada diantara 06^0 53’ 30,81” – 07^0 23’6” lintang selatan dan 112^0 17’ 01,22” - 112^0 33’12” Bujur timur. Dengan luas wilayah 2.504 Ha (Untuk lebih jelasnya peta Kelurahan Blimbing dapat dilihat pada Lampiran 2.) (Sumber data: Kelurahan Blimbing,2013).

Batas-batas wilayah Desa Blimbing adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Deda Dadapan
- Sebelah Timur : Desa Kandang Semangkon

- Sebelah Barat : Kelurahan Brondong

Desa Blimbing merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan yang berada di daerah pesisir. Berdasarkan keadaan topografinya, Desa Blimbing berada pada 2-5 meter dari permukaan air laut sehingga wilayah ini termasuk dataran rendah. Iklim daerah tersebut dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata berkisar 37^0C. Sebagian besar bentang wilayah Desa Blimbing berada di tepi pantai pesisir dengan luas 10 Ha, sisanya berada pada aliran sungai dan bantaran sungai yang masing-masing memiliki luas 2 Ha. Desa Blimbing merupakan daerah pantai, yaitu tepatnya pantai Utara Jawa. Orbitasi atau dari jarak Desa Blimbing dengan pusat pemerintahan Kecamatan Paciran 5 km, dari Kabupaten Lamongan sejauh 49 km dan jarak dari propinsi Jawa Timur sejauh 70 km (Sumber data: Kelurahan Blimbing, 2013).

4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Blimbing

4.1.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Blimbing tahun 2013, berdasarkan tingkat usia dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok pertama merupakan kelompok penduduk yang memiliki tingkat usia <18 tahun yang berjumlah 6.374 orang, kelompok kedua merupakan kelompok tingkat usia yang produktif bekerja 18-56 tahun yang berjumlah 10.265 orang, kelompok ketiga yaitu kelompok kelompok usia yang tidak produktif >56 tahun berjumlah 1.783 orang. Dari uraian diatas maka, di Desa Blimbing paling banyak tingkat usia yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<18	6.374	34,61
2	18-56	10.265	55,72
3	>56	1.783	9,67
	Jumlah	**18.422**	**100**

(Sumber data: Kelurahan Blimbing, 2013)

4.1.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Blimbing tahun 2013, jumlah penduduk berjumlah 18.422 jiwa. Dengan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yang berjumlah 9.278 jiwa, sedangkan pada perempuan berjumlah 9.144 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki – laki	9.278	50,38
2	Perempuan	9.144	49,63
	Jumlah	**18.422**	**100**

(Sumber data : Kelurahan Blimbing, 2013)

4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Blimbing tahun 2013, terbagi dalam beberapa kelompok. Mayoritas penduduk Desa Blimbing bekerja sebagai Nelayan sebanyak 3.470 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	225	3,35
2	Buruh tani	575	8,58
3	Buruh migrant	201	3,00
4	Pegawai Negeri Sipil	295	4,41
5	Pedagang keliling	25	0,37
6	Nelayan	3.470	51,79
7	Montir	3	0,04
8	Dokter swasta	8	0,11
9	Pembantu rumah tangga	157	2,34
10	TNI	21	0,31
11	POLRI	17	0,25
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	183	2,73
13	Pengusaha kecil menengah	237	3,53
14	Dukun kampung terlatih	1	0,01
15	Jasa pengobatan alternative	3	0,04
16	Dosen swasta	12	0,17
17	Pengusaha besar	10	0,14
18	Karyawan perusahaan swasta	925	13,80
19	Karyawan perusahaan pemerintah	20	0,29
20	Sopir	219	3,26
21	Tukang becak	48	0,71
22	Tukang ojek	18	0,26
23	Tukang cukur	7	0,10
24	Tukang batu/kayu	18	0,26
	Total	**6.699**	**100**

(Sumber data : Kelurahan Blimbing, 2013)

4.1.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangga, dan Negara. Dan pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia itu sendiri.

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Blimbing tahun 2013, sebagian besar adalah tamat SMA berjumlah 2.202 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Tidak pernah sekolah	332	4,32
2	Tamat SD	938	12,22
3	Tamat SMP	1.340	17,47
4	Tamat SMA	2.202	28,69
5	Tamat D-1	730	9,51
6	Tamat D-2	527	6,86
7	Tamat D-3	810	10,55
8	Tamat S-1	525	6,84
9	Tamat S-2	270	3,51
	Total	**7.674**	**100**

(Sumber data : Kelurahan Blimbing, 2013)

4.1.2.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Keadaan penduduk berdasarkan agama di Desa Blimbing tahun 2013 dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok. Mayoritas penduduk Desa Blimbing memeluk agama Islam dengan jumlah 18.407 orang, laki-laki dengan jumlah 9.268 dan perempuan yang memeluk agama Islam berjumlah 9.139 orang, sedangkan yang memeluk agama Kristen berjumlah 15 orang, diantaranya laki-laki berjumlah 10 orang, dan perempuan berjumlah 5 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Keadaan penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Laki – Laki	Perempuan
1	Islam	9.268	9.139
2	Kristen	10	5
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Protestan	-	-
6	Aliran kepercayaan lain	-	-
	Jumlah	**9.278**	**9.144**

(Sumber data : Kelurahan Blimbing, 2013)

4.2 Karakteristik Fisik Binaan Kawasan PPN Brondong

4.2.1 PPN Brondong

Pelabuhan Perikanan nusantara Brondong berdiri sekitar tahun 1936, dimana berawal dari peristiwa tenggelamnya kapal Van Der Wick milik Hindia Belanda. Pada saat itu nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian menolong para korban kapal van der wick tersebut. Kejadian ini dibuktikan dengan didirikannya tugu mercusuar yang terletak di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Tugu mercusuar dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Tugu mercusuar PPN Brondong

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong saat itu masih berupa Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang dikelola oleh Pemerintah daerah setempat dengan fasilitas hanya berupa Gedung TPI sebagai tempat Nelayan Brondong atau Nelayan Blimbing dan sekitarnya untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Semakin menigkatnya aktifitas dan kegiatan perikanan tangkap di wilayah pelabuhan, sehingga pada tahun 1978 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang pengelolaannya dibawah pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mempunyai 2 Rukun Nelayan (RN) yaitu: Rukun Nelayan (RN) Brondong dan Rukun Nelayan (RN) Blimbing. Tempat kantor Rukun Nelayan (RN) Brondong terletak disebelah barat dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, sedangkan tempat kantor Rukun Nelayan Blimbing

terletak disebelah timur dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Fasilitas yang ada di PPN Brondong terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama dalam menunjang kegiatan operasional di PPN Brondong, fasilitas fungsional yang merupakan mendukung pengembangan usaha perikanan tangkap yang ada di PPN Brondong, dan fasilitas penunjang merupakan fasilitas sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6. Fasilitas yang ada di PPN Brondong

- **Fasilitas Pokok di PPN Brondong**

No	Jenis fasilitas	Volume
1	Areal pelabuhan lahan industry Lahan industry	2,59 Ha 1,85 Ha
2	Dermaga/jetty	161 m 364,5 m
3	Kolam pelabuhan	23,4 Ha
4	Turap (revetment)	2,139 m
5	Jalan kompleks Jalan selatan Jalan barat	2.000 m 3.990 m 1.280 m
6	Breakwater	292 m

Sumber: data statistik PPN Brondong (2013)

- **Fasilitas Penunjang di PPN Brondong**

No	Jenis fasilitas	Volume
1	Tempat ibadah	100 m^2
2	Pagar keliling	380 m
3	Mess operator	250 m^2
4	Rumah kalabuh	120 m^2
5	Rumah Dinas	170 m^2
6	Kios/warung	250 m^2

Sumber: data statistik PPN Brondong (2013)

- **Fasilitas Fungsional di PPN Brondong**

No	Jenis fasilitas	Volume
1	Gedung TPI	1.080 m^2
2	Gudang keranjang	100 m^2
3	Shelter Nelayan	100 m^2
4	Tangki dan instalasi	170 m^3
5	Tangki BBM	150x25 ton
6	Listrik dan instalasi	345 KVA
7	Genset dan instalasi	170 KVA
8	Tempat penjualan BBM	36 m^2
9	Bengkel	120 m^2
10	Kantor Perum	480 m^2
11	Pabrik es balok	15-50 ton/hari
12	Pabrik es curai	-
13	Areal parker	800 m^2
14	Ruang sortir ikan	120 m^2
15	Rumah genset	60 m^2
16	Tower air	1 unit
17	BPN	125 m^2
18	Pos masuk	25 m^2
19	Kantor Pelabuhan	348 m^2
20	Los pengepakan ikan	480 m^2
21	MCK	60 m^2
22	Los pemisahan kepala ikan	300m^2
23	Refer container	1 unit
24	Rambu navigasi	4 buah
25	Pabrik es mini	1 unit
26	Kantor syahbandar	63,25 m^2
27	Bengkel pelabuhan	27,6 m^2
28	Pos satpam	6 m^2
29	Area bongkar muat	960 m^2
30	Pos jaga	24 m^2
31	Gedung PPDI	2.976 m^2
32	Ruang sortir ikan	744 m^2
33	Kantor atministratur	96 m^2
34	Tendon air tawar	1 unit
35	IPAL	120 m^3/hari
36	tandon air tawar	276 m^2
37	Tandon air laut	122,97 m^2
38	Gardu dan instalasi listrik	240 KVA

Sumber: data statistik PPN Brondong (2013)

4.2.2 KUD Minatani

Dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan yang mengarah pada peningkatan perekonomian nasional, maka di kawasan pelabuhan juga didirikan KUD yang beranggotakan masyarakat nelayan Brondong dan nelayan Blimbing,

guna menunjang usahanya. KUD Mina tani ini didirikan berdasarkan badan hukum Nomor 4716.B/BH/II/1980 dengan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 7166/BH/II/1995 dengan tugas pokok yaitu sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan/Nelayan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota KUD pada khususnya. Kantor KUD Minatani dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Kantor KUD Minatani

4.2.3 RN (Rukun Nelayan) Blimbing

Pada tahun 1976 RN (Rukun Nelayan) Blimbing bernama HKN (Himpunan Kerukunan Nelayan). Kemudian pada tahun 1987 berganti nama RN (Rukun Nelayan) berdasarkan keputusan bersama, meskipun tidak melalui keputusan secara resmi, tetapi sudah menjadi keputusan bersama yang dihubungkan dengan *culture* (budaya) setempat, RN (Rukun Nelayan) sendiri masih dibawah naungan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Untuk pemilihan ketua RN (Rukun Nelayan) Blimbing sendiri dipilih oleh kelompok Nelayan dan masa jabatanya 5 tahun sekali, ketua RN (Rukun Nelayan) Blimbing sekarang dipimpin oleh Bapak Nur Wahid, SPd. Kantor Rukun Nelayan (RN) Blimbing masih dalam ruang lingkup kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

RN (Rukun Nelayan) Blimbing sebagai pusat pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Nelayan khususnya nelayan Blimbing, dan sebagai tempat informasi yang diperlukan nelayan untuk melaut. Untuk fasilitas yang disediakan RN (Rukun Nelayan) Blimbing antara lain kantor RN (Rukun Nelayan), mushola,

sangar (tempat perbaikan jaring), gubok nelayan, pengolahan air minum, tempat perbaikan perahu, dan kantin informasi nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 :

Tabel 7. Fasilitas yang ada di RN (Rukun Nelayan) Blimbing

No	Fasilitas	Gambar
1	Kantor RN (Rukun Nelayan) Blimbing Fungsi: sebagai tempat kantor RN (Rukun Nelayan) Blimbing dan sebagai informasi bagi nelayan tentang tinggi gelombang.	
2	Mushola Fungsi: sebagai sarana beribadah.	
3	Sangar (tempat perbaikan jaring) Fungsi: tempat untuk memperbaiki alat tangkap payang atau jaring.	
4	Gubok nelayan Fungsi: sebagai tempat berteduh nelayan.	
5	Pengolahan air bersih Fungsi: sebagai tempat untuk membeli air besih, yang dibutuhkan nelayan untuk perbekalan melaut yang digunakan untuk mandi nelayan di perahu.	

6	Tempat perbaikan perahu Fungsi: sebagai tempat sandaran perahu, yang digunakan untuk memperbaiki perahu atau mengecat perahu.	
7	Kantin informasi nelayan Fungsi: sebagai tempat warung kopi untuk nelayan dan sebagai tempat pertukaran informasi antar nelayan.	

Sumber data: RN Blimbing (2013)

- **Acara "*Petik Laut*" RN Blimbing**

Acara "*Petik Laut"* yang dilaksanakan oleh RN Blimbing diiselenggarakan satu tahun sekali pada bulan Februari-Maret selama satu minggu, dalam rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Tradisi acara "*petik laut"* di Desa Blimbing dilakukan untuk memperingati "*tutup playang"* atau tutup tahun. "*tutup playang"* terjadi pada musim "*baratan*". Musim *"baratan"* adalah musim angin kencang yang berhembus dari arah barat, sehingga masyarakat Blimbing banyak yang tidak melaut saat musim "*baratan",* tetapi banyak juga yang masih melaut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Acara "*petik laut"* di Desa Blimbing dahulunya disebut dengan Tasyakuran Laut, pada tahun 2009 diganti dengan acara "*petik laut"*. Tradisi acara "*petik laut"* sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang masih tetap dilaksanakan pada musim "*baratan"*, pemilihan waktu tersebut berdasarkan pada saat "*tutup playang"* (tutup tahun). Acara tempat pelaksanaan "*petik laut"* Desa Blimbing dilaksanakan di depan kantor RN Blimbing yang masih dalam ruang lingkup kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Tradisi acara tasyakuran laut masyarakat Blimbing pada tahun 1970 adalah dengan melakukan ritual pemotongan kepala kerbau atau sapi yang dipersembahkan kepada laut dengan cara diletakkan di tiang pancang atau "*anjer".* Tiang pancang atau "*anjer"* adalah penanda pintu masuk dan keluarnya perahu Nelayan, tiang pancang atau "*anjer"* terbuat dari batang pohon kelapa, tetapi pada tahun 2003 diganti dengan tiang yang terbuat dari besi agar lebih kuat, selain itu tradisi tasyakuran laut juga ada ritual perayaan perahu secara bersama-sama mengendarai perahu menuju ketengah laut sebagai tanda suka cita. Tiang pancang atau "*anjer"* dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Tiang pancang atau "*anjer"*

Pada tahun 1980 tradisi acara tasyakuran laut mengalami perubahan dengan menghilangkan ritual acara pemotongan kepala kerbau atau sapi yang dipersembahkan kepada laut yang diletakkan di tiang pancang atau "*anjer".* Masyarakat Desa Blimbing menganggap bahwa acara ritual tersebut merupakan kegiatan yang syirik dan menyimpang dari ajaran Islam, perubahan ini dilakukan sesuai dengan masyarakat Desa Blimbing yang mayoritas beragama Islam. Kemudian pada tahun 2009 acara tasyakuran laut dirubah dengan nama "*petik laut"*, karena dianggap lebih komersial dan dapat menarik sponsor lebih banyak. Sedangkan tradisi acara "*petik laut"* sampai sekarang tahun 2014 masih dilakukan karena sebagai hiburan masyarakat Desa Blimbing, untuk mempererat

tali persaudaraan antar nelayan masyarakat Blimbing dan sekitarnya. Acara hiburan "*petik laut"* yang tidak bisa dihilangkan adalah acara hiburan wayang kulit, karena wayang kulit merupakan acara warisan pada zaman dahulu sehingga masyarakat Desa Blimbing masih mempertahankan acara hiburan wayang kulit.

Sebelum acara "*petik laut"* dimulai masyarakat Desa Blimbing mempersiapkan acara musyawarah warga nelayan, yang bertujuan untuk memutuskan waktu pelaksanaan dan susunan acara "*petik laut"*. Musyawarah warga nelayan biasanya dilakukan pada bulan November tahun sebelumnya. Tanggal dan tempat untuk musyawarah warga nelayan Desa Blimbing diputuskan oleh panitia acara "*petik laut"* yaitu RN Blimbing. Untuk dana acara *"petik laut"* panitia meminta sumbangan dana kepada juragan perahu, toko-toko agen nelayan yang ada di Desa Blimbing, pabrik yang ada disekitar wilayah Blimbing, dan meminta sponsor dari salah satu perusahaan rokok.

Acara "*petik laut"* tahun 2014 dilaksanakan pada bulan Februari-Maret selama satu minggu penuh, dalam rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Tradisi acara "*petik laut"* di Desa Blimbing dilakukan untuk memperingati "*tutup playang"* atau tutup tahun. Untuk susunan acara "*petik laut"* tahun 2014 sebaga berikut: malam tasyakuran atau *"slametan",* acara pembukaan yang dipimpin oleh Bupati Lamongan, wayang kulit, bakti sosial pembagian sembago untuk warga Nelayan Desa Blimbing yang kurang mampu, goyang pantura, dan acara penutup adalah pengajian akbar. Malam tasyakuran adalah susunan acara yang dilakukan pertama kali dalam acara "*petik laut"*. malam tasyakuran digunakan untuk musyawarah singkat antar panitia dengan warga masyarakat Desa Blimbing, yang dibuka langsung oleh ketua RN Blimbing Bapak Nur Wahid, S.pd. bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar panitia penyelenggara

dengan warga masyarakat Desa Blimbing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Acara malam tasyakuran

Sumber data: acara "petik laut" RN Blimbing (2014)

Acara pembukaan adalah acara sesudah malam tasyakuran, wajib dilakukan sebelum dimulainya acara hiburan "*petik laut"*, acara pembukaan dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Bapak H. Fadeli, SH. Acara pembukaan dilakukan dengan memberikan pidato bahwa sudah dimulainya acara hiburan "*petik laut"*. Dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Acara pembukaan "*petik laut"*

Sumber data: acara "petik laut" RN Blimbing (2014)

Acara ketiga adalah acara hiburan wayang kulit, acara ini sudah menjadi susunan acara wajib setiap ada acara tradisi "*petik laut"* di Desa Blimbing, wayang kulit merupakan acara yang masih tetap dilestarikan dari zaman dulu sampai sekarang. Acara wayang kulit digemari oleh masyarakat Desa Blimbing, khususnya para orang tua. Acara hiburan wayang kulit dilaksanakan 2 hari pada acara tradisi "*petik laut"* 2014 di Desa Blimbing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Acara hiburan wayang kulit

Sumber data: acara "petik laut" RN Blimbing (2014)

Acara selanjutnya adalah bakti sosial yang dilakukan oleh panitia pelaksana (RN Blimbing) dengan memberikan pembagian sembago atau beras kepada warga Nelayan Blimbing yang kurang mampu yang diserahkan langsung oleh Bupati Lamongan Bapak H. Fadeli, SH, dan ketua Rukun Nelayan Blimbing Bapak Nur Wahid, S.pd. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Acara bakti sosial 2014

Sumber data: acara "petik laut" RN Blimbing (2014)

Acara selanjutnya adalah acara goyang pantura yang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan khususnya para pemuda masyarakat Desa Blimbing untuk memeriahkan acara tradisi "*petik laut"* 2014. Acara goyang pantura dilaksanakan 2 hari dalam susunan acara tradisi "*petik laut"* 2014. Untuk lebih jelasnya dapat diliha pada gambar 9.

Gambar 9. Goyang pantura 2014

Sumber data: acara "petik laut" RN Blimbing (2014)

Acara selanjutnya acara penutup atau acara terakhir adalah pengajian akbar, acara ini dilakukan untuk berdo'a kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat yang diberikan atas hasil laut, pengajian akbar ini langsung dipimpin oleh Ustadz,

dan acara pengajian akbar ini menandai akhir dari acara tradisi "*petik laut"* 2014 di Desa Blimbing.

Adanya acara "*petik laut"* setiap tahun sekali memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat nelayan yang berada di Desa Blimbing, dampak yang dirasakan adalah memperoleh pendapatan tambahan yang diperoleh masyarakat nelayan dengan berjualan selama acara "*petik laut"* berlangsung, dan dampak positif lainya dengan adanya acara "*petik laut"* untuk mempererat tali silaturahmi atau ikatan sosial antar nelayan.

4.3 Perkembangan Produksi Perikanan

Kecamatan Paciran pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal panjang pantai ±14,6 km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 20.058 orang. Sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 3.390 unit dengan berbagai jenis alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah *purse seine, gill net* (bringsang, rajungan), payang*, rawai, bubu, dogol,* dan *tramel net*. Pada tahun 2013 jumlah nelayan di Desa Blimbing sekitar 3.470 jiwa, sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 415 unit. Selain usaha penangkapan masyarakat Blimbing banyak melakukan kegiatan usaha dari hasil produksi penangkapan ikan seperti olahan ikan asin, krupuk, abon ikan.

4.3.1 Musim Ikan

Musim ikan (musim puncak) adalah banyaknya stok ikan atau jumlah ikan yang ada diperairan tersebut mencapai jumlah yang banyak dari hasil tangkapan Nelayan. Sedangkan untuk musim ikan yang ada di Desa Blimbing dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Selain itu musim ikan berkaitan erat dengan pergantian musim yang sedang terjadi. Musim ikan di perairan Blimbing dapat dibagi tiga, antara lain:

a. Musim Puncak

Musim puncak terjadi pada bulan agustus sampai dengan oktober, ditandai dengan angin, arus dan gelombang air laut yang besar tapi halus, dari arah timur sampai tenggara menuju arah ke barat. Pada musim ini Nelayan aktif melakukan penangkapan ikan, dan merupakan musim panen bagi Nelayan.

b. Musim Sedang

Musim sedang terjadi pada bulan oktober sampai dengan bulan November, yang ditandai dengan angin bertiup kencang dengan gelombang yang besar (ombak pecah). Selama periode ini nelayan masih melakukan aktifitas melaut seperti biasanya.

c. Musim Paceklik

Ada dua musim paceklik, yaitu musim paceklik barat atau "*baratan"* dan musim paceklik timur atau *"timuran"*. Pada musim paceklik barat atau *"baratan"* terjadi pada bulan desember sampai dengan februari, sedangkan pada musim paceklik timur atau *"timuran"* terjadi pada bulan juni. Biasanya kedua musim paceklik ini ditandai dengan adanya arus dan gelombang air laut yang besar, dan musim ini terjadi bersamaan pada musim hujan. Pada musim ini berlangsung, Nelayan masih ada yang melaut, sebagian besar tidak melaut dan memanfaatkan untuk memperbaiki perahu atau memperbaiki alat tangkap (jaring).

4.3.2 Perkembangan Alat Tangkap

Semakin pesatnya perkembangan teknologi penangkapan ikan berkenaan dengan alat tangkap, mendorong nelayan untuk menggunakan berbagai jenis alat tangkap agar hasil tangkapan dapat meningkat. Namun demikian alat penangkap ikan merupakan salah satu subyek yang cukup rumit untuk dipelajari karena banyak jenis dan variasi yang disesuaikan dengan keragaman tujuan jenis ikan yang ditangkap. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya terjadi kenaikan jumlah alat tangkap, karena kebanyakan nelayan meninggalkan alat tangkap yang sudah tidak produktif dan beralih pada penggunaan alat tangkap yang tepat guna atau dimodifikasi untuk disesuaikan dengan daerah tangkapannya (fishing ground). Jumlah alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Tahun 2013 juga dihitung berdasarkan jumlah kapal yang bongkar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menurut jenis alat tangkapnya masing-masing. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8. Jumlah alat tangkap berdasarkan jumlah Kapal perikanan yang bongkar di PPN Brondong Tahun 2013

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (Unit)	Keterangan
1	Mini purse seine	2	20-30 GT
2	Dogol besar	27	10-20 GT
3	Dogol kecil	2	<10 GT
4	Payang	1.197	10-20 GT
5	Rawai	247	<10 GT
6	Gill net	-	10-20 GT
7	Lain-lain	-	<10 GT
	Jumlah	**1.475**	

Sumber: data statistik PPN Brondong (2013)

4.3.3 Produksi dan Nilai Produksi Ikan

Produksi ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berkembang secara fluktuatif. Berdasarkan data statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong produksi ikan tahun 2013 mengalami kenaikan 0,67% dibandingkan dengan produksi ikan tahun 2012, dimana pada tahun ini jumlah ikan yang didaratkan sebesar 58.145 ton sedangkan tahun 2012 ikan yang didaratkan sebesar 57.763 ton. Demikian halnya dengan nilai produksi ikan juga mengalami kenaikan 5,38%, pada tahun 2012 nilai produksi ikan sebesar Rp.610.997.703.450,00 dan pada tahun 2013 ini meningkat menjadi Rp.643.841.726.850,00. Apabila dirata-rata maka per-hari nelayan dapat

menangkap 159 ton ikan, sedangkan standart produksi ikan yang didaratkan untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2006 tentang klasifikasi Pelabuhan Perikanan adalah sebesar 30 ton per hari sehingga dapat dikatakan bahwa produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong cukup tinggi.

Jumlah produksi tersebut juga didukung ikan dari luar baik dari jalur darat (truk) maupun laut (kapal collecting: kapal penampung dari kapal operasi), karena harga pasar ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan di luar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sehingga hampir tidak pernah terjadi paceklik ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada setiap musim. Jenis ikan yang didaratkan pun bervariasi mulai dari ikan demersal (dasar) hingga ikan pelagis (permukaan), namun cenderung lebih di dominasi dari jenis ikan demersal seperti kuningan, kapas-kapas, swanggi (mata besar), dan ayam-ayam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Jenis dan jumlah ikan yang didaratkan di PPN Brondong Tahun 2013

No	Jenis ikan	Produksi Ikan		Harga Rata-Rata (Rp/Kg)
		Volume Produksi (Ton)	Nilai (Rp)	
1	Alu-alu	758.965	6.875.008.500	9.058
2	Ayam-ayam	1.831.260	12.843.332.500	7.013
3	Banyar	111.394	1.390.739.600	12.484
4	Beloso	1.443.690	8.601.553.500	5.958
5	Bawal hitam	132.105	3.389.955.000	25.661
6	Baronang/sadar	218.556	6.640.021.000	30.381
7	Cucut	321.695	5.935.344.500	18.450
8	Campuran	433.625	1.427.631.750	3.292
9	Cumi-cumi	1.207.217	36.358.421.200	30.118
10	Ikan jaket	994.450	23.417.745.000	23.548
11	Ikan sebelah	328.330	4.936.948.500	15.037
12	Kakap merah	585.250	26.040.316.500	44.494
13	Kembung	78.838	838.562.000	10.637
14	Kuningan	15.678.439	148.642.992.800	9.481
15	Kerapu	934.724	31.332.638.800	33.521
16	Kerong-kerong	355.500	7.003.972.500	19.702
17	Kapas-kapas	6.986.027	39.814.812.900	5.699
18	Kurisi	172.140	6.300.076.400	36.599
19	Kuwe	1.466.011	37.640.108.800	25.675
20	Layang	5.115.056	62.831.193.800	12.284
21	Lencam	373.222	5.857.662.500	15.695
22	Lemuru	103.994	581.251.200	5.589
23	Lemadang	251.780	3.858.772.400	15.326
24	Layur	110.482	1.392.517.700	12.604
25	Mata besar/swanggi	14.135.601	101.097.576.900	7.152
26	Manyung	543.425	10.237.114.200	18.838
27	Peperek	543.745	2.163.732.000	3.979
28	Pari	899.349	12.040.746.400	13.388
29	Selar kuning	100.082	870.024.000	8.693
30	Tenggiri	268.825	9.399.056.000	34.963
31	Tongkol	1.183.352	17.526.331.500	14.811
32	Tembang	194.600	989.650.000	5.086
33	Tonang	283.480	5.565.916.500	19.634
	Jumlah Total	**58.145.209**	**643.841.726.850**	

Sumber: data statistik PPN Brondong (2013)

4.4 Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Lamongan Dan Desa Blimbing

a. Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai wilayah perairan laut sepanjang 47 km yang meliputi Kecamatan Brondong dan Paciran. Dengan kondisi geografis tersebut, produksi perikanan laut di Kabupaten Lamongan cukup melimpah, melebihi kebutuhan konsumsi ikan oleh masyarakat. Potensi hasil laut dan pengembangan kawasan pantai lainnya adalah budidaya tambak udang, pembenihan udang, tambak bandeng, Pengembangan dan pembibitan mangrove. Selain dari perairan laut, produksi ikan di Kabupaten Lamongan juga didukung dari hasil budidaya ikan dan udang di perairan darat seperti tambak, sawah tambak, kolam.

Keadaan umum perikanan di wilayah Kabupaten Lamongan meliputi penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan ikan. Pada sektor perikanan tangkap, Kabupaten Lamongan memiliki beranekaragam potensi lestari, diantaranya sumberdaya perikanan demersal, yaitu : ikan layur, kerapu, kakap, bawal, sebelah, bambangan, dan lain-lain. Sedangkan sumberdaya perikanan pelagis besar, yaitu ikan tuna, cakalang, tongkol, tengiri, dan marlin. Sumberdaya perikanan pelagis kecil, yaitu: selar dan layang.

Pada sektor budidaya, pengolahan usaha budidaya perikanan dilakukan melalui usaha budidaya air payau di tambak dan budidaya air tawar yang dilakukan di kolam. Wilayah Kabupaten Lamongan mempunyai panjang pantai seluas 37 km yang merupakan modal dasar untuk budidaya air payau. Kabupaten Lamongan mengembangkan udang vannamei dan ikan bandeng.

Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Lamongan sebagian besar dalam bentuk pengasinan atau pengeringan, pembuatan terasi dan lain-lain. Dalam pengolahan umumnya masih bersifat tradisional dan kurang

memperhatikan aspek higienitas dan kebersihan dan sekarang ini di kabupaten Lamongan sudah banyak didirikan pabrik-pabrik pengolahan ikan modern. Potensi perikanan di Kabupaten Lamongan semakin diperhatikan oleh Pemerintah. Contohnya dengan mengembangkan salah satu prasarana perdagangan ikan, yaitu TPI Brondong. TPI Brondong memiliki tujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat pesisir.

b. Keadaan Umum Perikanan Desa Blimbing

Desa Blimbing merupakan desa nelayan yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kelurahan Blimbing terletak di tepi pantai utara Jawa Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Brondong. Kecamatan Paciran pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal panjang pantai ±14,6 km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 20.058 orang. Sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 3.390 unit dengan berbagai jenis alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah *purse seine, gill net* (bringsang, rajungan), payang*, rawai, bubu, dogol, dan tramel net*. Sedangkan jumlah nelayan Blimbing sekitar 3.470 nelayan, jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 415 unit perahu, yang didominasi oleh perahu yang menggunakan alat tangkap *Payang* yang berjumlah 267 dan sisanya menggunakan alat tangkap *rawai* (pancing) yang berjumlah 148. Selain usaha penangkapan masyarakat Blimbing banyak melakukan kegiatan usaha dari hasil produksi penangkapan ikan seperti olahan ikan asin, krupuk, abon ikan.

Semua ikan hasil tangkap nelayan Desa Blimbing didaratkan di TPI pelabuhan Brondong untuk dilelang, namun ada sebagian Nelayan yang langsung menjual ikan hasil tangkapanya kepada pemborong yang menanti disekitar TPI tanpa melalui proses lelang dengan menggunakan kesepakatan tersendiri. Ikan yang dilelang di TPI sebagian besar merupakan hasil tangkap

payang diantaranya ikan swanggi, ikan khurese, ikan kuniran, ikan kipas-kipas, ikan bloso, ikan biji nangka, ika ayam-ayam laut, ikan pari, ikan bukur/jaket,dll. Tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong merupakan tempat pelelangan ikan dengan luas 400 m^2 yang berfungsi sebagai tempat kegiatan tempat lelang antara nelayan dan bakul serta tempat bakul-bakul menjual ikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mempunyai peranan yang sangat stategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan laut terutama yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan– Propinsi Jawa Timur. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah, restoran dll, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat disekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

4.5 Perkembangan Alat Tangkap Payang di Desa Blimbing

Pada tahun 1940 nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing masih menggunakan secara manual dan menggunakan layar dan dayung untuk melaut, besar jaringnya kurang lebih sekitar 10 meter, dan tali "*batek"* panjang 50 meter sisi kanan dan sisi kiri, jumlah nelayan melaut satu perahu sekitar 4 orang, daerah penangkan masih didekat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, kurang lebih 30 mil dari darat dan jumlah perahu di Blimbing baru ada 30 perahu tradisional. Seperti yang diungkapkan Bapak Nur Wahid sebagai ketua RN (Rukun Nelayan) Blimbing:

"*biyen "batek" payang, iku siseh-siseh e 33 depo per 1 setengah depo ketemune 50 meter, terus sakiki dowone "batek" kiro-kiro 100 meter, 66 depo siseh-sisehe"*

Artinya : dulu tali *"batek"* payang, satu sisi-nya sekitar 33 ukuran per 1 ukuran, ketemunya 50 meter, sehingga sekarang panjang tali *"batek"* sekitar 100 meter, 66 ukuran satu sisinya.

Di saat tahun 1980, munculah mesin penggerak, pertama donfeng dan yammar (mesin diesel), panjang tali *"batek"* hampir 100 meter dan jumlah nelayan semakin berkembang, sehingga banyak juragan perahu yang membuat perahu berukuran besar antara 20-30 GT, ABK-pun semakin bertambah, penghasilanya semakin meningkat. Jarak untuk melakukan operasi penangkapan semakin jauh di perairan bawaian (Gresik). Berkembang lagi 1995-2008 munculah mesin PS (mesin truck) bahkan ada yang mengunakan mesin fuso, jarak untuk melakukan operasi penangkapan ikan semakin jauh di perairan masalembu (Madura), perairan karamean (Sulawesi), dan mata sirih (Kalimantan). Pada tahun 2008-2013, menggunakan mesin ps 100 dan ps 120 mitsubishi, menggunakan 4 unit, sebagai pendorong 3 unit, dan penggerak gardan. Sedangkan jumlah nelayan Blimbing pada tahun 2013 berjumlah 3.470 nelayan, jumlah nelayan di Desa Blimbing setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena para pemuda di Desa Blimbing masih mencintai pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 415 unit perahu, yang didominasi oleh perahu yang menggunakan alat tangkap payang yang berjumlah 267 unit dan sisanya menggunakan alat tangkap *rawai* (pancing) yang berjumlah 148 unit.

4.6 Pembagian Kerja Nelayan Payang

Pembagian kerja adalah pekerjaan yang dibagi–bagi, atau distribusikan diantara anggota suatu kelompok, dan pekerjaan diarahkan serta dikoordinasikan kelompok ini menjadi suatu tim. Dalam suatu tim, dan umumnya bila terdapat spesialisasi dan pembagian kerja, dimana setiap kategori staf

menggunakan keahliannya capai tujuan, manajemen bertugas mengatur keseimbangan proporsi tiap jenis pekerja untuk pekerjaan yang harus dilakukannya (Brahm, 1995).

Dalam pembagian kerja nelayan payang masing-masing mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pembagian kerja yang sudah diterapkan oleh pemilik perahu (juragan perahu), sehingga dalam melaut menghasilkan hasil tangkapan yang maksimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, ada dua fungsi dari pembagian kerja nelayan payang yaitu pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK (anak buah kapal) atau "*belah"*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10.

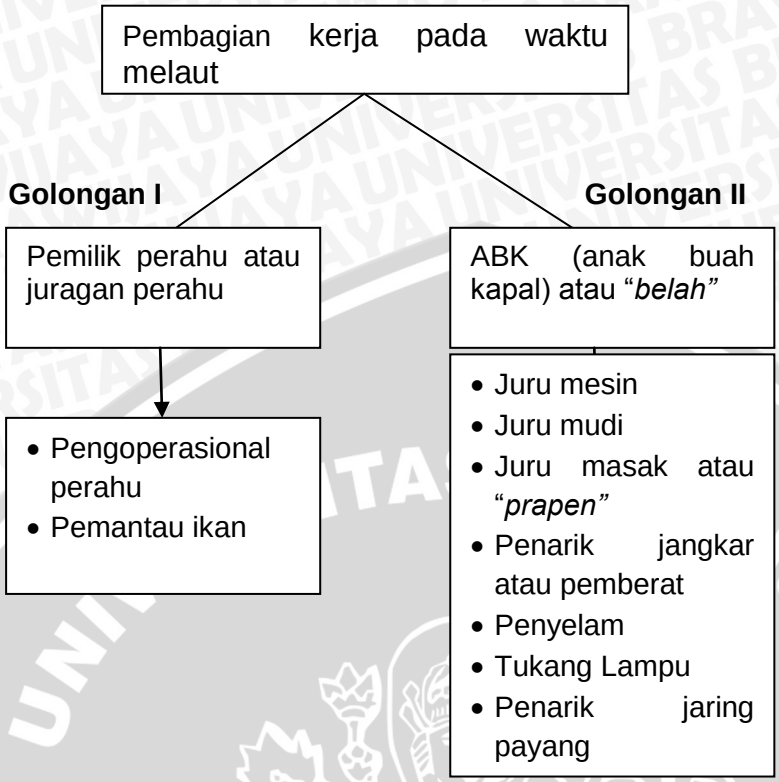

Gambar 10. Pembagian Kerja nelayan payang

Sumber: diolah berdasarkan analisa hasil penelitian, 2014

Dari pembagian kerja nelayan payang pada waktu melaut terdapat dua golongan dan mempunyai tugas masing-masing dalam pembagian kerja nelayan *Payang*. Golongan pertama adalah pemilik perahu atau juragan perahu yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan yaitu sebagai pengoperasional perahu dan pemantau ikan. Sedangkan golongan kedua yaitu ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* yang mempunyai peranan yang sangat vital dalam melakukan penangkapan ikan secara langsung yaitu diantarannya juru mesin 2 orang, juru mudi 2 orang, juru masak 2 orang, penarik jangkar atau pemberat 1 orang, penyelam 1 orang, tukang lampu 2 orang, penarik jaring payang 15 orang (semua yang ada di perahu).

Tugas pembagian kerja nelayan payang menurut golongannya masing-masing:

- Pembagian kerja nelayan payang golongan pertama beserta tugasnya:

- Pemilik perahu atau juragan laut sebagai pemimpin dalam perahu untuk mengkoordinasi seluruh ABK yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan.
- Pengoperasional perahu tugasnya yaitu sebagai pemegang kendali perahu dan mengkoordinasi seluruh ABK dalam melakukan operasi penangkapan ikan, tugas ini dilakukan langsung pemilik perahu atau juragan perahu.
- Pemantau ikan tugasnya sebagai memantau atau mendeteksi tempat berkumpulnya ikan, tugas ini dilakukan langsung oleh pemilik perahu atau juragan perahu dengan menggunakan alat pendeteksi ikan.

- Pembagian kerja nelayan payang golongan kedua beserta tugasnya:

- ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* sebagai pekerja dan ikut langsung dalam operasi penangkapan ikan dilaut.
- Juru mesin tugasnya untuk memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan dalam melakukuan operasional penangkapan ikan, dan juru mesin-nya adalah 2 ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* yang ditunjuk langsung oleh pemiik perahu atau juragan perahu.
- Juru mudi tugasnya sebagai pemegang kendali jalannya perahu untuk melakukan operasi penangkapan ikan dilaut, juru mudi dilakukan langsung oleh ABK yang ditunjuk langsung oleh pemilik perahu atau juragan perahu.
- Juru masak atau *"prapen"* tugasnya untuk membuat makanan didalam perahu, dan juru masak dilakukan oleh ABK yang berjumlah 2 orang.
- Penarik jangkar atau pemberat tugasnya yaitu untuk menarik jangkar atau pemberat dengan menggunakan gardan, supaya jangkar atau pemberat

tersebut bisa naik ke perahu dengan cepat, tugas ini dilakukan oleh 1 ABK (anak buah kapal) atau *"belah"*.

- Penyelam tugasnya untuk apabila terjadi kesalahan teknis dalam melakukan penangkapan seperti jaring tersangkut pada baling-baling perahu, dan apabila tersangkutnya tali atau *"batek"* dalam operasi penangkapan ikan, tugas ini dilakukan oleh 1 ABK (anak buah kapal) ata "*belah"*.
- Bagian lampu perahu tugasnya untuk mengatur penerangan yang ada diperahu pada saat akan berangkat melaut atau melakukan operasi penangkapan ikan pada malam hari, Bagian lampu penerangan yang ada diperahu dilakukan oleh 2 ABK.
- Penarik jaring payang tugasnya yaitu menarik jaring dan menatannya kembali pada waktu operasi penangkapan ikan. Penarik jaring payang ini, dilakukan oleh semua orang yang ada diperahui yang berjumlah 15 orang 1 pemilik perahu atau juragan perahu dan 14 ABK (anak buah kapal) atau *"belah"*.

Didalam pembagian kerja pada nelayan payang golongan pertama yaitu pemilik perahu atau juragan perahu yang ikut serta langsung dalam melakukan operasi penangkapan ikan dan sebagai pengawas langsung ABK (anak buah kapal) "*belah"* dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing, yang sudah ditentukan oleh pemilik perahu atau juragan perahu.

Sedangkan golongan kedua dalam pembagian kerja pada nelayan payang yaitu ABK (anak buah kapal) "*belah"* yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya kepada pemilik perahu atau juragan perahu, sehingga dapat meghasikan pekerjaan yang maksimal dalam operasi penangkapan ikan.

4.7 Sosial Masyarakat Nelayan Alat Tangkap Payang Desa Blimbing

4.7.1 Perilaku Masyarakat Pesisir

Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki karakter yang sangat keras, karena dipengaruhi oleh faktor geografis daerah, tak terkecuali pada masyarakat Nelayan pesisir yang berada di Desa Blimbing yang memiliki karakter yang keras, terbuka, loyal, dermawan, dan gaya hidup mewah. Karakter keras dan suara lantang, karena masyarakat nelayan Desa Blimbing kehidupannya dilaut untuk mencari mata pencaharian yang membutuhkan nyali atau keberanian yang tinggi dalam melakukan operasi penangkapn ikan dilaut, dan memiliki suara lantang, karena nelayan terbiasa hidup dilaut dengan cuaca atau musim yang tak menentu, dan didalam perahu, nelayan hanya mendengarkan suara mesin dan angin yang ada dilaut saat para nelayan berangkat melaut, sehingga para nelayan memiliki suara yang khas yaitu lantang keras, karena didalam perahu saat melakukan operasi penangkapan ikan, nelayan terganggu oleh suara mesin perahu yang keras dan angin laut kencang, sehingga nelayan saat melakukan operasi penangkapan ikan atau sedang melaut berbicaranya lantang dan keras, supaya terdengar oleh nelayan yang lain saat melakukan operasi penangkapan ikan atau sedang melaut. Untuk karakter masyarakat nelayan Desa Blimbing yang kedua yaitu mempunyai karakter atau sifat yang terbuka, yang dimaksud terbuka yaitu masyarakat nelayan yang mau menerima masukkan dari teman nelayan lain, misal dalam hal pembuatan perahu yang membutuhkan perbandingan dalam membuat perahu dan terbuka dalam menunjukkan tempat atau daerah penangkapan ikan yang banyak terdapat ikan, perbincangan para nelayan biasanya dilakukan di sangar atau tempat berteduh yang berada di kantor RN Blimbing yang masih dalam kawasan PPN Brondong dan warung-warung kopi yang ada di Desa Blimbing dan sekitarnya. Sedangkan karakter yang ketiga adalah loyal, masyarakat nelayan Desa Blimbing terkenal dengan

karakter atau sifat yang loyal dalam pertemanan, sehingga masyarakat nelayan Blimbing banyak dijumpai pada saat tidak melakukan aktivitas melaut, masyarakat nelayan Blimbing berkumpul dengan temannya seperti di warung kopi secara bersama-sama, dan jarang sekali pertemanan para nelayan di Desa Blimbing terjadi perselihanan atau ketegangan sesama temannya. Karakter atau sifat yang keempat dimiliki masyarakat nelayan Desa Blimbing yaitu memiliki sifat dermawan dalam memberikan sumbangan, seperti memberikan sumbangan pada saat acara petik laut yang dilaksanakan RN Blimbing, sumbangan gerak jalan dan karnaval yang diadakan dalam memperingati HUT RI, dan memberikan sumbangan-sumbangan yang lain. Untuk karakter atau sifat yang terakhir yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Desa Blimbing yaitu memiliki karakter atau sifat gaya hidup mewah dalam membeli barang atau produk yang terpenting adalah kualitas dan mutunya, sehingga banyak sekali masyarakat istri nelayan atau perempuan di Desa Blimbing sebagian besar menggunakan perhiasan emas.

Masyarakat pesisir memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan lahan untuk mencari mata pencahariaan dalam melaut, dan jam kerja yang tidak menentu tergantung dari jumlah ikan yang didapat pada saat melaut dan teknologi yang digunakan pada saat melakukan operasi penangkapan ikan dilaut. Pada nelayan payang di Desa Blimbing, perahu yang digunakan berukuran 10-20 GT, biasanya pada satu bulan bisa melaut (*trip*) 2-3 kali, lama melaut biasannya berkisar 7-10 hari, tergantung jumlah ikan yang diperoleh. Sedangkan pada perahu yang berukuran 20-30 GT, biasanya dalam satu bulan bisa melaut (*trip*) 2 kali saja, untuk lama melaut biasanya berkisar antara 12-15 hari tergantung perolehan ikan yang didapatkan oleh nelayan pada saat melaut atau melakukan operasi penangkapan ikan. Sedangkan untuk daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan payang Desa Blimbing biasanya dilakukan penangkapan ikan di perairan bawean (Gresik), perairan masalumbu

(Madura), sampai dengan perairan mata sirih (Kalimantan), dan perairan karamean (Sulawesi). Hasil tangkapan dari nelayan payang Desa Blimbing diantarannya jenis ikan swanggi, ikan khurese, ikan kuniran, ikan kipas-kipas, ikan bloso, ikan biji nangka, ika ayam-ayam laut, ikan pari, ikan bukur/jaket,dll. Semua ikan hasil tangkapan nelayan payang di Desa Blimbing didaratkan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

4.7.2 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir, yang membedakan adalah tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat pesisir, sehingga membentuk pembeda masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Perbedaan stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir yaitu perbedaan kelas-kelas sosial atau perbedaan tingkatan, sehingga ada yang kelas tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu yang membedakan adalah kedudukan, di mana dalam masyarakat pesisir kedudukan yang paling tinggi adalah pemilik perahu atau juragan perahu, sedangkan kedudukan yang paling rendah adalah kedudukan nelayan atau ABK (anak buah kapal), dari stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir yang paling penting adalah hubungan sosial antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan nelayan ABK (anak buah kapal), sehingga tidak ada strata dari hubungan sosial keduannya yang diakibatkan oleh perbedaan kelas maupun perbedaan kedudukan.

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Blimbing yang membedakan adalah dari segi kedudukan, kekayaan, dan yang paling penting adalah terjadinya hubungan sosial yang baik antara pemilk perahu atau juragan perahu dengan nelayan ABK (anak buah kapal) atau "*belah*". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 11.

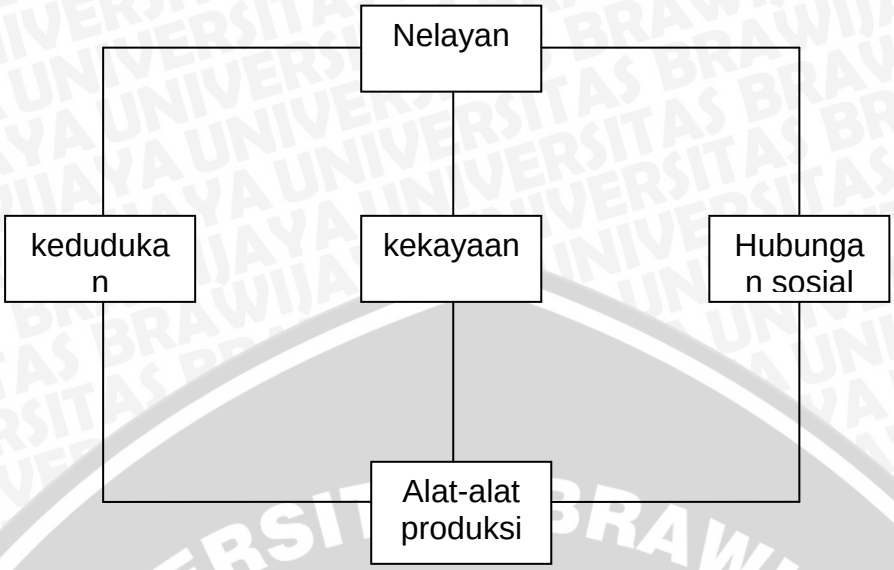

Gambar 11. Skema stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Blimbing dapat dihasilkan beberapa kontruksi stratifikasi sebagai berikut:

a. Segi kedudukan, pada nelayan payang terbagi atas pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK (anak buah kapal) atau *"belah"*. Dimana ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* terdiri dari juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"*, penarik jangkar atau pemberat, tukang lampu, penarik jaring payang. Dari golongan ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* yang memimpin langsung dalam melakukan operasi penangkapan ikan adalah pemilik perahu atau juragan perahu, sehingga dalam segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu. Karena pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan (perahu, mesin, jaring payang, dan perlengkapan yang lain), sedangkan ABK (anak buah kapal) atau *"belah"* hanya sebagai pekerja untuk melakukan penangkapan ikan.
b. Segi kekayaan, pemilik perahu atau juragan perahu pendapatanya lebih tinggi dari pada ABK (anak buah kapal) atau *"belah"*. Hal ini disebabkan, karena

pemilik perahu atau juragan perahu yang memiliki modal usaha dan alat-alat produksi (perahu, mesin, jaring payang, dan perlengkapan yang lain) dalam melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga dalam pembagian hasil yang diterima pemilik perahu atau juragan perahu lebih besar dari pada ABK (anak buah kapal) atau *"belah".*

c. Segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan payang di Desa Blimbing tidak ada strata dari hubungan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kelas antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK (anak buah kapal) atau *"belah",* sehingga hubungan sosial keduannya terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan.

4.8 Sistem Bagi Hasil Nelayan Payang

Menurut Harahap (1993) *dalam* Laila (2010), sistem bagi hasil dalam perikanan tangkap adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan faktor produksi dengan pembagian hasil terhadap suatu unsur produksi yang lain, yaitu tenaga kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bersih usaha dan juga dalam bentuk lawuhan sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh pada saat tersebut.

Dalam pembagian hasil yang dilakukan pada nelayan di Desa Blimbing adalah dengan hasil bersih usaha yaitu, hasil produksi (nilai produksi setelah diambil untuk pembagian lawuhan atau *"iwak-iwak-an"*) sebesar 10%, dikurangi biaya operasional, pembayaran untuk penjual ikan yang sudah menjualkan ikan nelayan sebesar 2%, dan retribusi TPI (tempat pelelangan ikan) sebesar 3%. lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* adalah pembagian ikan untuk dibawa pulang oleh nelayan ABK atau "*belah"* untuk dijadikan lauk pauk, tetapi nelayan lebih banyak

menjual lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* dari pada dibawa pulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.8.1 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan

Sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: yang pertama sistem bagi hasil secara Nasional yang merujuk kepada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang disahkan oleh Pemerintah sejak tahun 1964. Dan yang kedua adalah sistem bagi hasil secara lokal yaitu aturan bagi hasil yang dibuat oleh masyarakat nelayan itu sendiri dan sepekati secara bersama-sama oleh masyarakat Nelayan.

1. Sistem Bagi Hasil Nasional

Secara hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 2 tentang pembagian hasil yang berbunyi Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Selanjutnya, peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 3 tentang pembagian hasil yang berbunyi: (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

3. Perikanan laut:
   c. Jika di pergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
   d. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

4. Perikanan darat:
   c. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
   d. Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(2) pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan anatara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Peraturan yang lain, aturan tentang sistem bagi hasil juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1964 pasal 4 yang berbunyi bahwa beban–beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus sebagai berikut :

3. Perikanan laut:
   c. Beban–beban yang menjadi tanggungan bersam dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang rokok atau jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut , biaya sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran–iuran yang disahkan oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu atau kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain–lainnya.
   d. Beban–beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu atau kapal serta alat–alat yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak es dan lain sebagainya.

4. Perikanan darat:

   d. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya – biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu.

   e. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak: disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat di pakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan.

   f. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari–hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak dan penangkapannya pada waktu panen.

Sedangkan peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 5 yang berbunyi (1) jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan–bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih mengutungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai. (2) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika disesuatu daerah didalam membagi bahan–bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka pemerintah daerah tingkat II dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari

pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut diatas. Penetapan pemerintah daerah tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan dan Kelautan

2. Sistem Bagi Hasil Lokal

Sistem bagi hasil secara lokal adalah aturan sistem bagi hasil yang dibuat oleh Nelayan itu sendiri, dan disepakati secara bersama-sama oleh masyarakat nelayan. Sistem bagi hasil berbeda-beda tergantung alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pembagian hasil yang lebih dikenal dengan sebutan bagian, yaitu bagian hasil yang diperoleh oleh nelayan dari hasil tangkapan dalam setiap melaut. Upah kerja yang diperoleh nelayan ABK bervariasi tergantung pembagian kerja yang diterapkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Misal pembagian kerja yang diterapkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dalam pembagian kerja-nya ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Sehingga yang merangkap pekerjaan akan memperoleh hasil yang lebih dari pada nelayan ABK atau *"belah"* biasa. Sehingga sistem bagi hasil secara lokal, dianggap lebih tepat sesuai dengan nilai, norma dan tradisi secara turun-temurun masyarakat nelayan.

4.8.2 Bagi Hasil Usaha Penangkapan Alat Tangkap Payang Desa Blimbing

Bagi hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing di bagi menjadi dua bagian atau *"umanan"* antara pemilik perahu atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK

mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Pendapatan bersih tersebut setelah dikurangi biaya operasional, retribusi TPI (Tempat pelelangan ikan), biaya manol, penjual ikan, dan biaya yang lainnya.

a. Untuk melihat proses pendaratan ikan sampai bagi hasil dapat dilihat pada gambar 12.

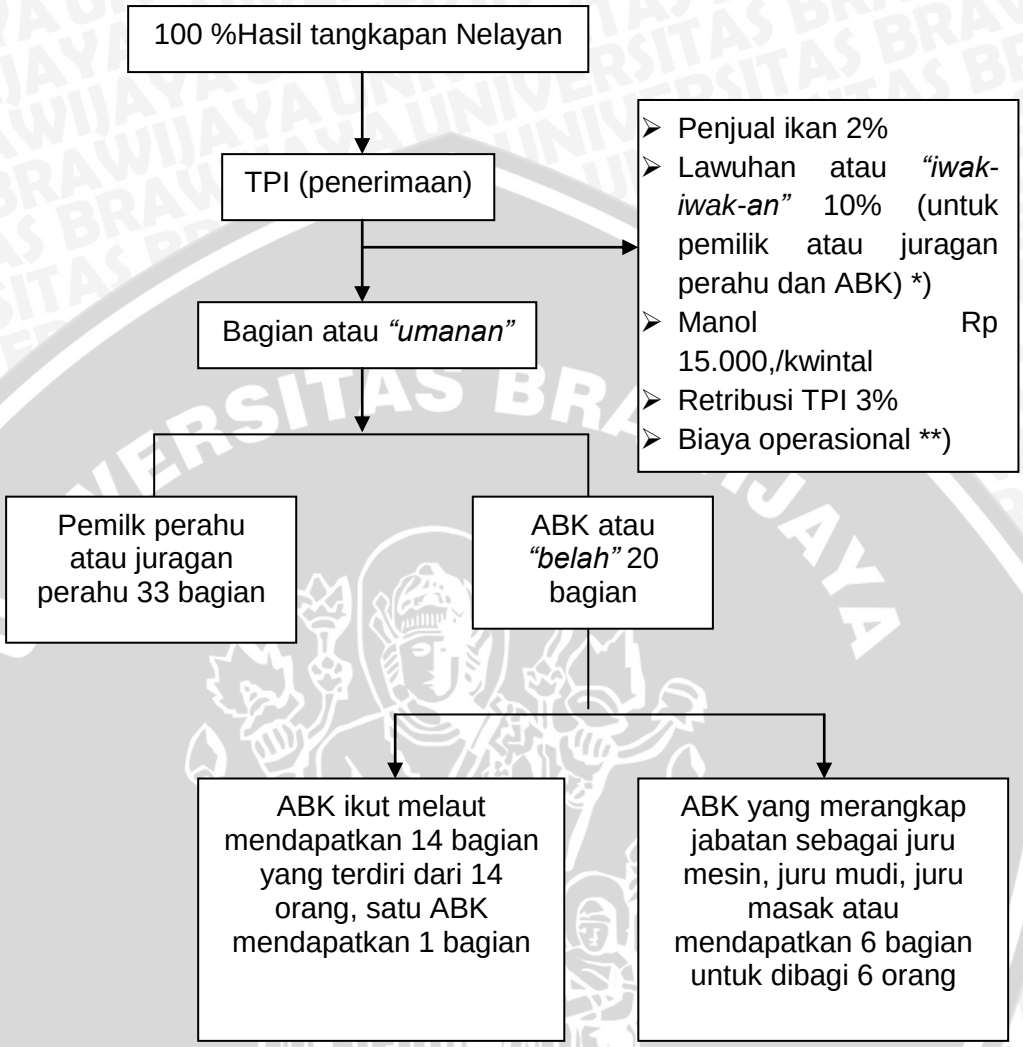

Keterangan: *) Lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* 10% dibagi antara pemilik atau juragan perahu dengan ABK atau *"belah"*.

**) Biaya operasional ditanggung oleh pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK, jika terjadi kerusakan mesin atau rusaknya jaring payang.

Gambar 12. Proses pendaratan ikan sampai dengan bagi hasil

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dari proses pembongkaran hasil tangkapan ikan nelayan payang sampai dengan pembagian hasil. Pada proses pembongkaran ikan menuju TPI disini biasanya terjadi pencurian ikan yang

dilakukan oleh bagian sortir ikan atau *"ngorek"* yang ada di pinggir pembongkaran ikan yang ada di perahu dan anak-anak kecil biasanya mengambil ikan yang jatuh pada saat diangkut oleh tukang pikul atau manol. tetapi jumlahnya hanya sedikit, karena pada saat diangkut oleh manol atau tukang pikul menuju TPI (tempat pelelangan ikan) ada yang mengawasi yaitu dari anak buah penjual ikan. Biasanya penjual ikan yang diberikan tugas oleh pemilik perahu atau juragan kapal untuk menjualkan ikan hasil tangkapan yaitu masih sanak saudara dari pemilik perahu atau juragan perahu.

Pendapatan bersih diperoleh dari jumlah penerimaan hasil produksi setelah dipotong lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* 10% dibagi antara pemilik atau juragan perahu dengan ABK atau *"belah"*, pembayaran untuk penjual ikan yang sudah menjualkan ikan nelayan sebesar 2%, pembayaran manol Rp15.000,/kwintal, retribusi TPI sebesar 3%, dan dipotong biaya operasional untuk terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring payang, yang membawa uang biaya operasional atau disebut dengan uang tengah adalah pemilik perahu atau juragan perahu. Kemudian dari pendapatan bersih tersebut dilakukan pembagian hasil yaitu antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau *"belah"*. Pembagian hasil atau "*umanan"* dilaksanakan di rumah pemilik perahu atau juragan perahu, biasanya pembagian hasil atau "*umanan"* ini dilakukan setelah pemilik perahu atau juragan perahu melakukan *totalan* hasil penjualan ikan dengan penjual ikan. Pemilik perahu atau juragan perahu memperoleh 33 bagian yang terdiri dari ikut melaut 1 bagian, perahu 8 bagian, mesin 12 bagian, gardan 2 bagian, alat tangkap payang 7 bagian, nahkoda 2 bagian, perbekalan 1 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang teridiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"*

mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Pembagian hasil nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang

No	Status Nelayan	Jumlah orang	Tugas	Bagian atau *"umanan"*
1.	Pemilik perahu atau juragan perahu	1	- Nahkoda - Ikut melaut - Perahu - Mesin - Gardan - Alat tangkap jaring Payang - Perbekalan	- 2 bagian - 1 bagian - 8 bagian - 12 bagian - 2 bagian - 7 bagian - 1 bagian
2.	ABK atau "*belah"*	14	- ABK atau "*belah"* ikut melaut - 6 orang ABK rangkap tugas sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak	- 1 bagian Per orang - 6 bagian

b. Pendapatan dari pembagian hasil nelayan alat tangkap payang

Dari hasil tangkapan nelayan payang mendapatkan hasil dari penjualan ikan sebesar Rp.113.300.000,- kemudian dipotong biaya retribusi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3% yaitu Rp.3.300.000,- sehingga hasil bersih yang diperoleh dari hasil pelelangan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sebesar

Rp.110.000.000,- selanjutnya dipotong untuk pembayaran manol sebesar Rp.2.700.000,- sehingga hasil bersih pendapatan dari hasil pelelangan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan dipotong pembayaran manol, masih menyisakan uang sebesar Rp.107.300.000,-

Kemudian dipotong biaya perbekalan untuk melaut seperti perbekalan bahan makanan untuk melaut, pembelian solar, es balok sebesar Rp.30.000.000,- dan hasilnya Rp.107.300.000,- dikurangi Rp.30.000.000,- masih menyisihkan uang sebesar Rp.77.300.000,- selanjutnya dipotong lagi untuk lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* sebesar 10% atau sekitar Rp.7.046.000,- untuk dibagi antara pemilik atau juragan perahu deng ABK atau "*belah".* Sehingga dari hasil pemotongan tersebut masih memperoleh uang sebesar Rp.70.254.000,-

Selanjutnya dipotong untuk pembayaran kepada penjual ikan yang sudah ditugaskan oleh pemilik perahu atau juragan perahu untuk menjualkan ikan sebesar 2% atau sekitar Rp.1.405.000,- sehingga dari hasil pemotongan tersebut masih memperoleh uang sebesar Rp.68.848.920,- dan dipotong lagi untuk biaya operasional sebesar Rp.1.000.000,-

Kemudian diperoleh pendapatan bersih setelah dikurangi dari retribusi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sebesar 3%, pembayaran manol Rp.15.000/kwintal, pemberian upah kepada penjual ikan sebesar 2%, dan dipotong biaya operasional untuk terjadinya kerusakan mesin dan jaring payang. Maka diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp.67.848.920,- untuk dibagikan kepada pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK atau "*belah"*. Kemudian pendapatan bersih tersebut dibagi 53 bagian yang terdiri dari pemilik perahu 33 bagian diantaranya: ikut melaut 1 bagian, nahkoda 2 bagian, perahu 8 bagian, mesin 12 bagian, gardan 2 bagian, jaring payang 7 bagian, dan perbekalan 1 bagian. Sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-

masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Untuk pembagian hasil pemilik perahu atau juragan perahu memperoleh hasil dari 33 bagian atau "*umanan"* sebesar Rp.42.245.554,- sedangkan ABK atau *"belah"* memperoleh hasil 20 bagian atau *"umanan"* berdasarkan rincian sebagai berikut: ABK 1 bagian x 14 orang, Rp.1.280.168 x 14 = Rp.17.922.352,- sedangkan ABK merangkap sebagai juru mudi, juru masak, juru mesin mendapatkan Rp7.681.008,- untuk dibagi 6 orang, hasil keseluruhan perolehan ABK dari 20 bagian memperoleh hasil sebesar Rp.25.606.366,-. Untuk lebih jelasnya pendapatan dari pembagian hasil nelayan alat tangkap payang dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Pendapatan dari pembagian hasil nelayan alat tangkap payang dalam 1 kali melaut *(trip)*

No	Uraian	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Pendapatan 1 kali melaut	113.300.000	-	113.300.000
2.	Retribusi TPI 3 %	-	3.300.000	110.000.000
3.	Biaya manol Rp.15.000/kwintal x 18 ton	-	2.700.000	107.300.000
4.	Biaya perbekalan antara lain: perbekalan bahan makanan,pembelian solar,dan es balok	-	30.000.000	77.300.000
5.	Lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* 10% untuk dibagi antara pemilik atau juragan perahu dengan ABK atau *"belah"*	-	7.046.000	70.254.000
6.	Penjual ikan 2% x *)	-	1.405.080	68.848.920
7.	Biaya operasional **)	-	1.000.000	67.848.920
8.	Pemilik perahu atau juragan perahu (33 bagian)	-	42.245.554	25.606.366
9.	ABk atau *"belah"* (20 bagian)	-	25.606.366	0

Keterangan: *) Hasil dari penjual ikan 2% diperoleh dari hasil retribusi TPI 3%, biaya manol Rp 15.000/kwintal x 18 ton, biaya perbekalan, lawuhan 10%, sehingga hasil tersebut dikalikan 2%.

**) Setelah dikurangi biaya operasional, kemudian dibagi menjadi 53 bagian antara pemilik atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK atau *"belah"* mendapatkan 20 bagian.

4.9 Potensi Dan Pereda Konflik Dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Payang

a. Potensi konflik dari sistem bagi hasil nelayan payang

Secara umum pemilik perahu atau juragan perahu di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan khususnya pada nelayan payang membebankan biaya operasional seperti terjadinnya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang, kepada ABK atau "*belah"* dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, dari pihak pemilik perahu atau juragan perahu merasa bahwa membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang kepada ABK atau "*belah"* cukup adil, menggingat bahwa modal invistasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar, disamping itu pihak nelayan ABK telah diuntungkan dari pendapatan uang lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* yang diperoleh dari kegiatan operasi penangkapan ikan yang diuangkan pada saat pembongkaran ikan di TPI (tempat pelelangan ikan). Kemudian dari pihak ABK atau "*belah"* merasa bahwa aturan yang dibuat oleh pemilik perahu atau juragan perahu tidak adil, karena biaya operasional seperti terjadinnya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang, ABK atau "*belah"* ikut menanggung, karena mereka beranggapan bahwa pada saat mereka melakukan operasi penangkapan ikan atau melaut, mereka mempertaruhkan nyawanya.

b. Pereda konflik sistem bagi hasil nelayan payang

Sistem bagi hasil khususnya nelayan payang di Desa Blimbing merupakan potensi konflik yang berkepanjangan tetapi semu, yang disebabkan oleh pandangan berbeda antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau "*belah",* akibat dari pemilik perahu atau juragan perahu membebankan biaya operasional seperti terjadinnya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang kepada ABK atau "*belah"* dengan cara ditanggung bersama-

sama. ABK atau "*belah"* beranggapan bahwa pada saat mereka melakukan operasi penangkapan ikan atau melaut, mereka mempertaruhkan nyawanya.

Namun, hal ini dalam konflik yang disebabkan oleh biaya operasional yang ditanggung bersama-sama antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau "*belah"* harus diperhatikan secar benar, sehingga tidak menyebabkan konflik antar keduannya. Disini terlihat bahwa nelayan ABK atau "*belah"* mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga Nelayan ABK atau "*belah"* menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau *"iwak-iwak-an"* dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar TPI (tempat pelelangan ikan) Brondong, sehingga nelayan ABK atau "*belah"* memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK atau "*belah"* menyadari bahwa modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau "*belah"* dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduannya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan Alat Tangkap Payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Alat Tangkap Payang di Desa Blimbing

   Pada tahun 1940 nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing masih menggunakan secara manual dan menggunakan layar dan dayung untuk melaut, besar jaringnya kurang lebih sekitar 10 meter, dan tali "*batek"* panjang 50 meter sisi kanan dan sisi kiri, jumlah nelayan melaut satu perahu sekitar 4 orang, daerah penangkan masih didekat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, kurang lebih 30 mil dari darat dan jumlah perahu di Blimbing baru ada 30 perahu tradisional. Di saat tahun 1980, munculah mesin penggerak, pertama donfeng dan yammar (mesin diesel), panjang tali *"batek"* hampir 100 meter dan jumlah nelayan semakin berkembang, Pada tahun 2008-2013, menggunakan mesin ps 100 dan ps 120 mitsubishi, menggunakan 4 unit, sebagai pendorong 3 unit, dan penggerak gardan. Sedangkan jumlah nelayan Blimbing pada tahun 2013 berjumlah 3.470 nelayan.

2. Sosial Masyarakat Nelayan Alat Tangkap Payang Desa Blimbing

   a. Perilaku masyarakat pesisir

      Masyarakat nelayan di Desa Blimbing khususnya nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang, memiliki karakter yang keras, terbuka, loyal, dermawan, dan gaya hidup mewah.

b. Stratifikasi sosial

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Blimbing yang membedakan adalah dari segi kedudukan, kekayaan, dan yang paling penting adalah terjadinya hubungan sosial yang baik antara pemilk perahu atau juragan perahu dengan nelayan ABK (anak buah kapal) atau "*belah*".

3. Bagi Hasil Usaha Penangkapan Alat Tangkap Payang

Bagi hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing di bagi menjadi dua bagian atau *"umanan"* antara pemilik perahu atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau *"belah"* ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau *"belah"* mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau *"belah"* yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau *"prapen"* mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Pendapatan bersih tersebut setelah dikurangi biaya operasional, retribusi TPI (Tempat pelelangan ikan), biaya manol, penjual ikan, dan biaya yang lainnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong khususnya masyarakat nelayan Desa Blimbing.
2. Perlu adannya pembentukan paguyuban nelayan khususnya nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang untuk menghidari konflik antar nelayan.

3. Perlu adanya pengawasan dalam mengawal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pencurian ikan secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung dan Raharjo, 2009. **Buku Kantong Sosiologi SMA IPS**. Penerbit Pustaka Widyatama. Yogyakarta.

Bariyah Khoirotul, 2004. **Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Pola Bagi Hasil Penangkapan Ikan Guna Mencapai Kesejahteraan Sosial Ekonomi (Studi Kapal Motor Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).** Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Brahm, 1995. **Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer.** Penerbit Buku Kedokteran EGC.

DKP, 2011. **Alat Tangkap Payang.** http//perpustakaan dinas kelautan dan perikanan.blogspot.com/2011/05/alat-tangkap-payang.html. Diakses pada tanggal 6 Juli 2014.

Fanni Ahmad, 2013. **Pembagian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo.** Skripsi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Jember. Jember.

Harahap, Nuddin, 1993. **Kekuatan Tradisi dalam Sistem Bagi Hasil dan Analisis Frofitabilitas Usaha Penangkapan Ikan di Jawa Timur,** The Toyota Foundation.

Haviland, W. A, 1993. **Antropologi. Edisi IV Jilid II.** Alih Bahasa R G. Soekadijo. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Istijanto, 2005. **Aplikasi Riset Pemasaran.** Penerbit PT. Gramedia Paska Utama. Jakarta.

Kecamatan Paciran, 2013. **Profil Kecamatan Paciran 2013.** Kecamatan Paciran. Lamongan.

Kelurahan Blimbing, 2013. **Profil Kelurahan Blimbing 2013.** Kelurahan Blimbing. Lamongan.

Kusnadi, 2000. **Nelayan (Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial).** Humaniora Utama Press. Bandung.

Kusnadi, 2003. **Akar Kemiskinan Nelayan.** Penerbit LKIS. Yogyakarta.

Kusnadi, 2007. **Jaminan Sosial Nelayan.** LKIS Yogyakarta. Yogyakarta.

Laila M. R, 2010. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.** Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang.

Lasabuda Ridwan, 2013. **Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.** Jurnal Ilmiah Platax.

Maryati dan Suryawati, 2001. **Sosiologi Untuk SMA Dan MA XI**. Penerbit Erlangga.

Moleong,J. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.

Pemkab Lamongan, 2013. **Potensi Perikanan Kabupaten Lamongan.** http://lamongankab.go.id/instansi/paciran/potensi-perikanan-kelautan/. Diakses pada tanggal 6 Juli 2014.

Pramono Djoko, 2005. **Budaya Bahari.** PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Priananta E. Y, 2008. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Purse Sein Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.** Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang.

Retnowati Endang, 2011. **Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum).** Universitas Wijaya Kusuma Surabay. Jurnal Hukum Vol. XVI. Tahun 2011. Hal 153-157.

RN (Rukun Nelayan) Blimbing, 2014. **Dokumentasi Acara *Petik Laut* Desa Blimbing.** Lamongan.

Samad Abdul, 1998. **Beberapa Catatan Penting Tentang Alat Tangkap Ikan Pelagik Kecil.** Jurnal Oceanografi.

Siombo R. M, 2010. **Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional.** Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sudarman Dan Darwis, 2003. **Metode Penelitian Kebidanan, Prosedur, Kebijakan, Dan Etik.** Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualititatif Dan R&D.** Penerbit Alfabeta. Jakarta.

Supranto, J. 2000**. Statistik Teori Dan Aplikasi.** Penerbit Erlangga. Jakarta.

Umar Husein, 1997. **Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran.** Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. **Definisi Nelayan**. http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-886. Diakses tanggal 8 juli 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Penelitian Di Desa Blimbing

Lampiran 2. Gambar Penelitian

Gambar 1. Perahu *Payang*

Gambar 2. Jaring *Payang*

Gambar 3. Tali "*batek" Payang*

Gambar 4. Perbaikan Jaring *Payang*

Gambar 5. Wawancara dengan Nelayan

Gambar 6. Perbaikan Mesin Perahu

Gambar 7. Wawancara dengan Ketua RN Blimbing dan Juragan Perahu

Gambar 8. Pendaratan Ikan

Gambar 9. Tukang Pikul atau Manol

Gambar 10. Penjual Ikan

Gambar 11. ABK atau "*Belah*"

Gambar 12. Juragan Perahu

Gambar 13. Pemilih Ikan "*ngorek*" **Gambar 14. Perbaikan Perahu**